



HARMONI DALAM PERBEDAAN

Strategi Diaspora Muslim Indonesia
Menghadapi Tantangan Anti-Islam di Belanda

Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.A
Johan Arifin, S.Ag., MM
Purwanto, SEI., MSI

HARMONI DALAM PERBEDAAN

Strategi Diaspora Muslim Indonesia Menghadapi Tantangan Anti-Islam di Belanda

Penulis : Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.A
Johan Arifin, S.Ag., MM
Purwanto, SEI., MSI

Editor : Muhammad Rouf

Desain Cover : Microsoftbing

Ilustrasi : Hot Mods - Chatgpt

Ukuran : 14.8 x 21 cm; Hal : vi + 98 hlm (104)

Cetakan I, Januari 2024

ISBN 978-623-8450-96-1



Penerbit

Insight Mediatama

Anggota IKAPI No. 338/JTI/2022

Watesnegoro No. 6 (61385) Mojokerto

Whatsapp 087762245559

mail@insightmediatama.co.id

www.insightmediatama.co.id

© **All Rights Reserved** Ketentuan Pidana Pasal 112-119 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah akhirnya buku yang berjudul “HARMONI DALAM PERBEDAAN Strategi Diaspora Muslim Indonesia Menghadapi Tantangan Anti-Islam di Belanda berhasil diterbitkan. Buku ini merupakan hasil dari penelitian *Dealing with Islamophobia in the Netherlands the Adaptation Strategy of Indonesian Moslem Diaspora in the Netherlands in Responding to the Anti islam Issues*. Shalawat dan salam senantiasa tersanjung pada Baginda Rasulullah saw, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan hak asasi siapapun dalam beragama.

Pada dasarnya, munculnya Islamophobia apalagi kemudian bermetamorfosis menjadi sebuah gerakan, maka secara alami akan mendapat respon dan mungkin semacam “perlawanan” meskipun dilakukannya dengan berbagai macam cara dan pendekatan. Penelitian ini dilakukan, pada awalnya, muncul saat saya selesai ditugasi sebagai Ketua Majelis Dewan Hakim MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur’an) Nasional Korpri yang digelar di Kota Padang Sumatera Barat. Pada saat itulah, sahabat saya Dr. Meirison – dosen UIN Imam Bonjol Padang, yang pernah sama-sama menghadiri International Conference on Islamic Law Reform di Amman Yordania -- datang bersilaturahmi. Di tengah ngobrol santai, muncul gagasan untuk penelitian kolaborasi bersama.

Dengan selesainya penelitian, sudah barang tentu banyak pihak yang membantu, meskipun tanggung jawab sepenuhnya ada di kami. Oleh karena itu, melalui pengantar ini, kami tim peneniliti mengucapkan terima kasih kepada Rektor, ketua LP2M UIN Walisongo, dan para narasumber, Prof. Welmoet Boender, Dr. George Misoud, Dr. Nur Hasyim, dan para responden, terutama warga diaspora muslim Indonesia yang tinggal di Belanda, Ibu Dr.

Sofia, Mas Deny, mas Nur Ahmad, dan lain-lain yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa disebut satu persatu di sini.

Budaya disiplin waktu, dan selisih jam antara Indonesia dan Belanda, merupakan hal yang membutuhkan penyesuaian yang cukup. Apalagi tim peneliti tidak bisa mendadak kencan waktu dengan para narasumber secara mendadak, harus dengan perjanjian/appointment, sekaligus menjadi pembelajaran. Setidaknya pembelajaran menggunakan transportasi umum, dengan cukup satu kartu, adalah hal yang perlu diadaptasi, jika bangsa ini ingin merespon perkembangan dan efisiensi, sekaligus menghindari “kebocoran” di sana-sini.

Kami sadar bahwa penelitian tentang isu sensitive dengan alokasi dana yang tidak cukup memadai dan hanya bisa tinggal sementara selama dua minggu termasuk perjalanan, adalah hal yang hampir mustahil mendapatkan data yang akurat, valid, dan reliabel. Namun karena kebaikan hati para sahabat, relasi, dan beberapa nama yang disebut di atas, penelitian ini dengan segala kekurangannya, bisa diselesaikan. Meskipun demikian, kami berharap, penelitian ini dapat berkontribusi dalam menambah informasi dan perkembangan tentang Islamophobia di Netherland dan respon Diaspora Muslim Indonesia, yang tak mengenal Lelah merespon dan menyuarakan ajaran dan keberagamaan Islam yang ramah, toleran, moderat, dalam kemasan Islam rahmatan lil ‘alamin.

Semoga laporan ini bermanfaat, dan bisa menjadi bagian dari berbagai hasil penelitian sebelumnya, dan menggugah untuk dilakukan penelitian lanjutan. Allah a’lam bi sh-shawab.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I	1
GAGASAN ISLAM MODERAT DAN MENJAWAB ISU ISLAMOFOBIA	1
A. Gagasan Islam Moderat	1
B. Narasi positif tentang Islam	10
BAB II	15
ISLAMOPHOBIA DAN STRATEGI ADAPTASI	15
A. Islamophobia	15
B. Strategi Adaptasi.....	20
C. Diaspora	24
D. <i>Multy Track Diplomacy</i>.....	28
BAB III.....	36
IMIGRAN MUSLIM DI BELANDA.....	36
A. Sejarah Masuknya Muslim d Belanda.....	36
B. Fenomena Islamophobia di Belanda	44
BAB IV	49
DIASPORA MUSLIM INDONESIA MENGHADAPI ISLAMPHOBIA	49
A. Perkembangan Islamophobia di Belanda.....	49
B. Strategi Adaptasi Diaspora Muslim Indonesia dalam Menanggapi Anti Islam di Belanda.....	69
BAB V	87
PENUTUP.....	87

A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90

BAB I

GAGASAN ISLAM MODERAT DAN MENJAWAB ISU ISLAMOPOBIA

A. Gagasan Islam Moderat

Hubungan antara Islam dan negara kembali menjadi perhatian serius dan menjadi isu global. Dialektika antara negara Islam dan negara sekuler kembali dipertanyakan, adanya stigma negatif dan Islamopobia di Eropa serta kalangan imigran Timur Tengah berlanjut dan meningkat (Feldman, 2012). Menyikapi fenomena tersebut, Kemlu RI sebagai *state actor* dan organisasi keagamaan sebagai *non state actor* melakukan upaya diplomasi berkelanjutan dan mengembangkan program “*Interfaith Dialogue, Empowering the Moderates*” (Ambary, komunikasi pribadi, 28 Juli 2020). Program ini bertujuan untuk memperkenalkan gagasan Islam moderat dan menjawab isu Islamopobia dengan pendekatan fikih Nusantara (Harisudin, 2017; Kasdi, 2019; Yaqin, 2021). Pendekatan fikih Nusantara yang dimaksud adalah memberikan narasi positif dan merespon dengan cara –cara yang humanis dan tidak frontal. Inilah keunikan warga muslim Indonesia yang berada di Belanda.

Phobia mengacu pada bentuk ketakutan dan kecemasan tertentu terhadap persoalan tertentu. Jika seseorang menghadapi situasi atau objek tertentu, maka dianggap kelompok tertentu berbahaya, dia akan merasa takut. Ketakutan yang berlebihan muncul karena adanya keinginan mengantisipasi (mencegah) suatu kejadian yang tidak diinginkan, bentuknya dapat berupa penghindaran (Moordiningsih, 2015: 74). Islamophobia diartikan sebagai

permusuhan yang tidak berdasar terhadap Islam dan ketakutan atau ketidaksukaan semua atau sebagian besar umat Islam (Escola-Gascón, Diez-Bosch, & Micó-Sanz, 2022).

Islamophobia juga dapat persepsi dan stereotip negatif yang ditujukan secara global terhadap komunitas dan warga negara Muslim meskipun sebagian besar dari mereka adalah aktor positif dan kontributor signifikan terhadap semua aspek kehidupan baik dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, olahraga dan seni (Al-Ansi, Chua, Kim, Yoon, & Han, 2022). Islamophobia merupakan pola pikir satu dimensi dengan empat kategori besar, seperti prasangka yang diungkapkan dalam percakapan sehari-hari dan tercermin dalam representasi media, pengecualian dari pekerjaan, dari manajemen dan tanggung jawab, dari politik dan pemerintahan, diskriminasi dalam praktik ketenagakerjaan, dalam penyediaan layanan seperti kesehatan dan pendidikan, kekerasan yang melibatkan pelecehan verbal, perusakan harta benda dan kekerasan fisik (Rehman & Hanley, 2023).

Muslim adalah masyarakat terlemah dalam kehidupan publik Belanda, perdebatan tentang isu anti Islam semakin intensif, dan sikap Muslim mungkin menjadi faktor penentu hasil pemilihan kepala daerah, serta pemilihan parlemen di Belanda. Partai Kebebasan (Partai PVV), atau lebih tepatnya partai pemimpin ekstrem sayap kanan Geert Wilders, hanya memiliki satu poin utama dalam programnya, yaitu "anti-Islam", yang wajar seperti yang diharapkan, kedua, politik kekuasaan di negara itu, tiba-tiba sejumlah besar orang Belanda, mereka percaya bahwa penyebab dari semua masalah mereka adalah kehadiran umat Islam dalam

kehidupan mereka. Mereka adalah orang yang paling bahagia sebelum kedatangan umat Islam, dan mereka menjadi sengsara setelah kedatangan imigran yang beragama Islam, dan tidak ada jalan keluar bagi mereka kecuali dengan bekerja untuk mengusir mereka atau setidaknya mengubah mereka dari agama mereka (Welten & Abbas, 2022).

Muslim di Belanda hanya satu juta dari enam belas juta penduduk Belanda, empat perlima dari mereka tidak sholat, dan setengahnya sekuler. Mereka adalah campuran dari berbagai bangsa, sekte, ras, generasi, dan bahasa. Dalam konteks tersebut, Belanda memiliki kedudukan khusus di kalangan umat Islam di Eropa. Negara ini menempati posisi kedua dalam jumlah penduduk Muslim terbesar di Eropa. Fakta ini mencerminkan pertumbuhan agama Islam yang sangat pesat di sana. Fenomena ini terkait erat dengan hubungan yang telah terjalin antara Islam dan Belanda selama berabad-abad sejak abad ke-17. Oleh karena itu, sumbangan yang diberikan oleh umat Islam terhadap perkembangan di Belanda sangatlah signifikan dan berpengaruh pada kebijakan negara dalam menjunjung tinggi prinsip kebebasan berbangsa serta toleransi. Karenanya umat Islam adalah yang paling beragam secara agama dan etnis dibandingkan dengan kelompok agama lain, paling miskin secara ekonomi, miskin secara sosial, dan paling tidak aktif secara intelektual dan budaya. Umat Islam berusaha memberikan narasi positif untuk kelompok mereka sendiri, yang merupakan antitesis dari kebebasan dan demokrasi, seperti yang diklaim oleh masyarakat Eropa Barat dan Belanda pada khususnya (Michels, 2006).

Anehnya, Islamopobia justru muncul di negara-negara yang dianggap demokratis, terutama di negara-negara

Eropa dan Barat. Tidak mengherankan jika banyak yang berpendapat bahwa Islamopobia diarahkan pada permusuhan, ketidakadilan, dan sikap diskriminatif yang tidak mendasar terhadap Islam. Belanda adalah negara yang menjunjung demokrasi yang baik, pemerintah maupun rakyatnya berpikiran terbuka, terutama dalam memandang pluralitas agama. Sehingga semestinya islamopobia tidak menjadi isu sentral di negara kincir angin tersebut. Namun demikian, kelompok orientalis dan individu yang memiliki pandangan anti-Islam terus menerus menyebarkan rasa takut dan sentimen kebencian terhadap umat Islam. Tindakan ini didasarkan pada alasan yang tampaknya berlebihan dan fobia yang tidak rasional.

Namun, sebenarnya menjaga hak-hak minoritas etnis dan agama merupakan bagian integral dari implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap individu memiliki hak untuk memilih keyakinan agama yang dipegang, dan setiap negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesetaraan di antara semua warganya. Namun, pada kenyataannya, kaum minoritas Muslim di Eropa sering kali menghadapi ancaman, pembatasan, dan larangan, yang mengakibatkan meningkatnya Islamophobia di kalangan penduduk Eropa. Akibatnya, persepsi masyarakat Eropa terhadap Islam semakin memburuk. Ketidak tahuan warga terhadap Islam semakin memperparah kehidupan beragama Islam dan Negara, serta ada ketakutan tentang bertambahnya populasi umat Islam. Keadaan seperti ini dikhawatirkan suatu negara akan menghadapi krisis identitas dan benturan pandangan hidup sebagai sebuah negara.

Manusia adalah musuh dari apa yang dia abaikan, dan kebencian membutuhkan dan mencegah pemiliknya melihat

separuh dunia yang diterangi. Dengan demikian, Belanda dapat merusak kehidupan politiknya selama empat tahun ke depan dengan dalih melakukan sabotase, dan mereka akan menemukan semua kehancuran itu. Dan itu adalah ilusi yang dibuat-buat, tidak ada Muslim yang menuntut penerapan Syariah di Belanda, dan tidak ada Islam yang dapat memutuskan ikatan demokrasi kuno yang berusia lebih dari dua abad (Welten & Abbas, 2022). Para imam masjid di Belanda mengecam apa yang didorong oleh beberapa pemuda Muslim untuk menyerukan pemberdayaan negara Islam di Belanda dan Belgia (Rana, 2007). Kecaman itu muncul setelah media Belanda melaporkan seruan orang tak dikenal melalui situs web mereka di Internet untuk menerapkan hukum Islam di Belanda dan meminta Ratu Beatrix untuk masuk Islam. Mereka menawarkan keamanan kepada sayap kanan Geert Wilders dan rekan-rekannya jika mereka berhenti menyerang Islam dan mengumumkan perpindahan agama mereka (Geert Wilders, 2019).

Kelompok Islamophobia di Belanda memiliki situs web, YouTube, dan halaman facebook, yang memuat film pemimpin penerapan ajaran Islam di Belgia, "Abu Omran", Khaled Rashid dari Saudi, dan Anwar al-Awlaki dari Yaman. Berbeda dengan Grup Penegakan ajaran Islam di Belgia, Grup Belanda belum mengumumkan siapa yang akan mewakilinya. Namun, juru bicara Grup Belgia berjanji dalam rekaman yang disebarakan di internet untuk segera mengumumkan juru bicara Syariah Belanda (Zucca, 2012). Dalam wawancara dengan surat kabar "Trouw" Belanda, juru bicara Kantor Perlawanan terhadap "terorisme" di Belanda dalam sebuah wawancara dengan surat kabar "Trouw" Belanda mengatakan bahwa mereka mengetahui

panggilan tersebut dan belum menemukan bukti yang jelas tentang hukuman, mengharuskan mereka untuk campur tangan secara langsung. Grup percaya itu tidak melanggar hukum Eropa dalam hak untuk menyatakan pendapat dengan mengajak orang untuk meninggalkan hukum buatan untuk menerapkan hukum Islam (Hofmann, 1999).

Sebagai reaksi pertama terhadap inisiatif tersebut, sayap kanan Geert Wilders menuntut pelarangan kegiatan pendukung penerapan Syariah dan pengusiran anggotanya dari Belanda (Geert Wilders, 2019). Dalam sebuah wawancara dengan Al-Jazeera Net dengan beberapa imam tentang masalah ini, ketua Asosiasi Imam di Belanda, Sheikh Bagali Al-Khammar, mengecam seruan ini, mengingatkan para pendukungnya yang tidak peduli. Katanya, “Siapa pun yang meminta penerapan sesuatu yang tidak pada tempatnya tidak lebih dari bodoh”, Baqali lebih memilih mengabaikan mereka karena mereka hanya mewakili diri mereka sendiri. Ustadz Yassin al-Farqani menjelaskan bahwa para pendukung seruan ini “adalah produk dari masalah sosial dan psikologis, dan mereka membutuhkan bimbingan dan dialog dengan para ulama yang berbicara bahasa mereka dan memahami situasi mereka. Para pemuda ini mengimpor ide mereka dari luar negeri setelah putus asa tentang realitas di mana mereka hidup (2010, الجزيرة). Imam masjid Sunni, Fawaz Junaid, mengatakan panggilan itu tidak ada hubungannya dengan Islam atau Muslim. Dia menekankan bahwa umat Islam memasuki tanah ini dengan perjanjian keselamatan, dan benar Syariah mengharuskan mereka untuk menghormati perjanjian ini (2010, الجزيرة).

Junaid tidak mengesampingkan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan menyebarkan ketakutan terhadap Islam

akan berdiri di belakang seruan ini dan merekrut pemuda tak dikenal untuk menjalankan agenda mereka sendiri, dengan mengatakan, "Saya tidak menutup kemungkinan bahwa mereka digunakan untuk menjalankan agenda mereka. tidak mengerti." Kemungkinan ini juga tidak dikesampingkan oleh Yassin Al-Furqani, yang mengatakan, "Umat Islam harus beralih ke kritik diri untuk koreksi, daripada bersembunyi di balik gagasan konspirasi." Pengamat percaya bahwa fenomena tersebut tidak lebih dari perpanjangan dari gerakan global yang menyerukan penerapan Syariah, yang terakhir diumumkan awal tahun ini di Belgia, dan otoritas keamanan mengkonfrontasinya dengan kampanye penangkapan karena dicurigai merencanakan tindakan kekerasan, tiga di antaranya. yang tergabung dalam advokat syariah di Belgia (Göle, 2011).

Komentar menteri tentang Islamopobia di Belanda menimbulkan kontroversi politik. Komentar menteri kehakiman Belanda bahwa hukum Islam dapat diterapkan jika dua pertiga dari populasi setuju dan komentar ini telah memicu badai politik di Belanda, di mana imigrasi ke negara tersebut merupakan salah satu topik yang paling kontroversial. Seorang juru bicara pemerintah mengatakan bahwa politisi Geert Wilders, yang dikenal karena sikap anti-imigrasinya, menyerukan keadaan darurat. Dalam kesempatan sidang DPR. Komentar Menteri Kehakiman Pete Hein Donner dalam sebuah buku terbitan menuai badai. Namun Donner membantah kontroversi yang memanas tersebut. Dia mengatakan kepada kantor berita Belanda ANP bahwa orang-orang mencoba untuk membohonginya dengan mengatakan bahwa dia mendukung penerapan hukum Islam, tetapi tidak seperti itu (Landman,

1991). Menteri Kehakiman mengatakan bahwa ajaran Islam bertentangan dengan konstitusi Belanda.

Secara teori, bentuk itu bisa diubah jika mayoritas penduduk Belanda setuju dengan penerapan pelaksanaan ajaran Islam. Lebih lanjut, menteri mengatakan bahwa luasnya reaksi yang ditimbulkan oleh komentarnya dalam bukunya yang berjudul *The Land of Hate and Envy*, yang membahas perubahan yang terjadi di Belanda selama lima belas tahun terakhir, telah membangkitkan keheranannya (Abdelkader, 2017). Jumlah umat Islam di Belanda yang memiliki kepadatan penduduk tinggi adalah sekitar satu juta umat Islam dari total 16 juta penduduk (Shadid, 1991). Namun, sebuah laporan riset yang dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan bahwa jumlah Muslim diperkirakan akan meningkat menjadi 8 persen dari total populasi Belanda pada tahun 2020, dibandingkan dengan angka saat ini yang juga sebesar 8 persen. Namun studi tersebut menunjukkan bahwa jumlah umat Islam terus meningkat selama beberapa dekade terakhir seiring masuknya imigran massal umat Islam dari Turki dan Maroko ke Belanda.

Sejak Insiden pembunuhan politisi terkenal anti-imigrasi Pim Fortuyn pada tahun 2002 (Szumigalska, 2015) telah memicu kontroversi luas. Dua tahun kemudian, kekhawatiran muncul tentang kecenderungan ekstremisme minoritas Muslim setelah seorang Muslim Belanda membunuh seorang sutradara film yang mengkritik Islam. Menteri Imigrasi Rita Verdonk, yang *telah* mempromosikan kebijakan baru yang keras yang menyerukan tes bahasa dan budaya Belanda bagi imigran baru, mengatakan dia setuju komentar menteri kehakiman itu teoretis. Dia mengatakan

bahwa demokrasi kita jauh lebih kuat daripada kekuatan mayoritas (Sunier, 2021). Orang-orang telah berjuang selama bertahun-tahun untuk mewujudkan nilai-nilai inti mereka, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Saya yakin kita akan terus memegang teguh prinsip-prinsip mendasar seperti kesetaraan gender dalam kerangka demokrasi kita (*European Institute for Gender Equality*, 2020).

Sebagai sebuah negara demokrasi, pemerintah Belanda telah melakukan upaya untuk mencegah rasisme yang diakibatkan oleh karena *Islamophobia*. Penegakan hukum ditempuh dengan cukup tegas. Subadi menuturkan, “Untung penegakan hukum di Belanda kuat, sehingga pelaku ditangkap dan diberi denda atau hukuman” (Subadi, 25 Juli 2020). Terbukti pada tahun 2016 Geert Wilders, seorang politikus anti-Islam sayap kanan, dibawa ke pengadilan atas tuduhan penghasutan dan diskriminasi melalui pidato di media” (Nursalikah, 2016).

Kelompok yang mengkampanyekan Islamofobia di Belanda cenderung datang dari politisi sayap kanan dengan dukungan konstituennya. Menurut Nur Hasyim Subadi, berdasarkan pengamatannya selama tinggal di Belanda, terdeteksi pihak yang mencoba mendiskreditkan Islam dan umat Islam kebanyakan adalah kelompok sayap kanan (Subadi, 25 Juli 2020). Mereka terang-terangan melontarkan pernyataan dan provokasi anti-Islam dengan berbagai cara, yang selalu ditanggapi oleh umat Islam. Di antara tindakan ofensif tersebut adalah penerbitan karikatur Nabi Muhammad; pelarangan simbol Islam seperti masjid, pesantren, dan hijab di tempat umum; pelarangan para pendatang Muslim dari negara-negara Islam yang telah

bekerja di banyak distrik di Belanda; dan gagasan diskriminatif lainnya (Subadi, 25 Juli 2020).

Menyikapi fenomena tersebut, Kemlu RI sebagai *state actor* dan organisasi keagamaan sebagai *non state actor* melakukan upaya diplomasi berkelanjutan dan mengembangkan program “*Interfaith Dialogue, Empowering the Moderates*” (Taufiq, Harisudin, & Maimun, 2022) yang bertujuan untuk memperkenalkan gagasan Islam moderat dan menjawab isu Islamophobia dengan pendekatan fikih Nusantara (Taufiq et al., 2022). Pendekatan fikih Nusantara yang dimaksud adalah memberikan narasi positif dan merespon dengan cara–cara yang humanis dan tidak frontal. Inilah keunikan warga muslim Indonesia yang berada di Belanda.

B. Narasi positif tentang Islam

Narasi positif tentang Islam telah dilakukan oleh para dispora Muslim Indonesia guna merespon soal Islamophobia. Menurut Munawir Aziz, dalam “*Diaspora Muslim Indonesia di Belanda Dorong Narasi Positif Islam, (29/4/2021)*” Menggambarkan bahwa komunitas Muslim Indonesia yang tinggal di Belanda berupaya memperkuat citra positif tentang Islam dan menjadi penghubung dalam diplomasi budaya, termasuk dalam upaya mengatasi Islamophobia. Terdapat beberapa unsur dalam komunitas diaspora Muslim di Belanda, seperti Persatuan Pemuda Muslim Eropa, PCI Nahdlatul Ulama, PCI Muhammadiyah, Stichting New Generation (SGB) Utrecht, Pengajian Mahasiswa Muslim, Pengajaran Dharma Wanita di KBRI Belanda The Hague, Stichting Indahnya Sedekah, serta Tombo Ati Den Haag

Penelitian oleh Gusnelly, Mudzakkir, Aidulsyah, & Mulyasari (2021) tentang pentingnya peran diaspora Muslim Indonesia dalam merespons tantangan Islamophobia di Belanda. Diaspora Muslim Indonesia telah berperan dalam membentuk jaringan yang tidak hanya menghubungkan mereka dengan isu-isu keagamaan di Indonesia, tetapi juga dengan realitas sosial lokal di Belanda serta Eropa secara lebih umum. Peran mereka memiliki signifikansi besar dalam upaya diplomasi lunak Indonesia di satu sisi dan memiliki dampak yang lebih luas, yaitu mendorong dialog sosial dan kemanusiaan antarnegara di sisi lain. Di tengah gejolak radikalisme agama dan meningkatnya Islamophobia baru-baru ini, buku ini bertujuan untuk menyajikan alternatif narasi guna mempromosikan interaksi global yang lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh Taufiq, Harisudin, & Maimun, (2022) menunjukkan bahwa dalam menghadapi Islamophobia di Belanda, diaspora Muslim Indonesia menggunakan strategi diplomasi multitrack yang berhasil menebarkan Islam yang ramah, anti teror, toleran, dan moderat dengan mempromosikan Islam yang damai melalui Islam Nusantara.

. Usaha untuk menyebarkan narasi positif tentang Islam tidak selalu berjalan dengan lancar di Belanda. Sebuah insiden terjadi pada saat PCI Nahdlatul Ulama (NU) Belanda mengadakan sebuah konferensi di Nijmegen (Siddik, 2021). Komunitas Muslim Indonesia yang tinggal di Belanda berupaya memperkuat citra positif tentang Islam dan menjadi penghubung dalam diplomasi budaya, termasuk dalam upaya mengatasi Islamofobia (Wawancara dengan Munawir Aziz. Sekretaris PCI Nahdlatul Ulama United Kingdom, 2023). Di sisi lain, penelitian oleh Gusnelly dan

rekan-rekannya dalam "*Buku Diaspora Muslim Indonesia di Belanda: Identitas, Peran, dan Konektivitas Keagamaan Global*," yang dihasilkan oleh Pusat Penelitian Daerah-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2W-LIPI), merespons tantangan ini dengan menganalisis bagaimana diaspora Muslim Indonesia di Belanda berperan dalam membentuk jaringan yang tidak hanya menghubungkan mereka dengan isu-isu keagamaan di Indonesia, tetapi juga dengan realitas sosial lokal di Belanda serta Eropa secara lebih umum. Aziz menambahkan bahwa

Peran mereka (diaspora Muslim asal Indonesia) memiliki signifikansi besar dalam upaya diplomasi lunak Indonesia di satu sisi dan memiliki dampak yang lebih luas, yaitu mendorong dialog sosial dan kemanusiaan antarnegara di sisi lain. Di tengah gejolak radikalisme agama dan meningkatnya Islamofobia baru-baru ini, buku ini bertujuan untuk menyajikan alternatif narasi guna mempromosikan interaksi global yang lebih baik (Wawancara dengan Munawir Aziz. Sekretaris PCI Nahdlatul Ulama United Kingdom, 2023).

Aziz menambahkan terdapat beberapa unsur dalam komunitas diaspora Muslim di Belanda, termasuk namun tidak terbatas pada: Persatuan Pemuda Muslim Eropa, PCI Nahdlatul Ulama, PCI Muhammadiyah, Stichting New Generation (SGB) Utrecht, Pengajian Mahasiswa Muslim, Pengajaran Dharma Wanita di KBRI Belanda The Hague, Stichting Indahnya Sedekah, serta Tombo Ati Den Haag (Wawancara dengan Munawir Aziz. Sekretaris PCI Nahdlatul Ulama United Kingdom, 2023).

Selain itu upaya penyebaran nilai-nilai Islam moderat terus digalakkan oleh PCINU Belanda. PCINU Belanda berusaha menyebarkan gagasan moderasi beragama dengan berbagai program termasuk dilaksanakannya konferensi internasional dua tahunan bekerja sama dengan universitas-universitas terkemuka di Belanda. Kegiatan ini bertujuan untuk untuk menampilkan wajah Islam moderat, damai dan toleran di Belanda dan benua Eropa (Anshori, 2023).

Usaha untuk menyebarkan narasi positif tentang Islam tidak selalu berjalan dengan lancar. Seorang Diaspora Muslim Asal Indonesia Syahril Siddik menyatakan

Ada sebuah insiden di mana PCI Nahdlatul Ulama (NU) Belanda mengadakan sebuah konferensi di Nijmegen. Pada acara tersebut, terjadi protes dari sekelompok organisasi sayap kanan di kota tersebut. Mereka menentang kunjungan Menteri Agama RI, dengan alasan bahwa Menteri tersebut masih mendukung penerapan syariah di Indonesia (Siddik, 2021)

Namun demikian kegiatan para Disapora asal Indonesia untuk melakukan kontra naratif terhadap Islamophobia tampaknya memberikan hasil nyata. Siddik menyatakan bahwa:

“ada pernyataan dari Geert Wilder, bahwa yang ingin dikurangi adalah Muslim dari Maroko dan Afrika. Kemudian ada yang bertanya, kalau Muslim dari Belanda – Indonesia – bagaimana? Wilder menjawab: “Mereka berbeda, mereka bisa tinggal di Belanda. Itu juga pertanyaan beberapa politikus anti-imigran Belanda.” Dengan kata lain, ini

menunjukkan bahwa Islam Indonesia bisa menjadi bagian dari diplomasi budaya di Belanda” (Siddik, 2021).

Menarik apa yang disampaikan oleh Amin Mudzakir, bahwa “perkembangan masyarakat muslim di Belanda antara lain didorong oleh tumbuhnya warga muslim Indonesia dan juga mahasiswa dari kelompok santri. Selain itu, ada juga kesadaran untuk mentransnasionalkan Islam Indonesia ke tingkat global.”

BAB II

ISLAMOPHOBIA DAN STRATEGI ADAPTASI

A. Islamophobia

Islamophobia meningkat secara signifikan sejak peristiwa 9/11, yang awalnya sering terlihat dalam wacana politik (Al-Ansi et al., 2022). Islamophobia diartikan sebagai permusuhan yang tidak berdasar terhadap Islam dan ketakutan atau ketidaksukaan semua atau sebagian besar umat Islam (Escolà-Gascón et al., 2022). Islamophobia juga dapat persepsi dan stereotip negatif yang ditujukan secara global terhadap komunitas dan warga negara Muslim meskipun sebagian besar dari mereka adalah aktor positif dan kontributor signifikan terhadap semua aspek kehidupan baik dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, olahraga dan seni (Al-Ansi et al., 2022). Islamophobia merupakan pola pikir satu dimensi dengan empat kategori besar, seperti prasangka yang diungkapkan dalam percakapan sehari-hari dan tercermin dalam representasi media, pengecualian dari pekerjaan, dari manajemen dan tanggung jawab, dari politik dan pemerintahan, diskriminasi dalam praktik ketenagakerjaan, dalam penyediaan layanan seperti kesehatan dan pendidikan, kekerasan yang melibatkan pelecehan verbal, perusakan harta benda dan kekerasan fisik (Rehman & Hanley, 2023).

Fenomena Islamophobia saat ini mengarah pada sentimen anti-Islam adalah hasil dari manipulasi politik yang direncanakan oleh kelompok intelektual yang memiliki pandangan negatif terhadap Islam, dan mereka menggambarkan Islam sebagai sebuah ancaman signifikan

(Cheng, 2015). Sebagian memahami bahwa Islamophobia sebagai satu corak keberagamaan seseorang atau sekelompok orang di kalangan umat beragama yang meyakini cara pandang keagamaannya lebih benar dari yang lainnya (Yendell & Huber, 2020). Biasanya, variasi dalam praktik keberagamaan ini cenderung menyoroiti satu elemen khusus dari agama yang dianutnya, sementara mengabaikan elemen-elemen lainnya. Munculnya sikap phobia, mengacu pada bentuk ketakutan dan kecemasan tertentu terhadap persoalan tertentu.

Fobia terhadap Islam tidak hanya menjaral seperti virus di pikiran sebagian masyarakat Barat, tetapi juga di kalangan warga negara yang merasa cenderung tidak mendukung keberadaan Islam sebagai agama mayoritas (Najib & Hopkins, 2019). Islam dianggap sebagai kekuatan yang mengancam kepentingan mereka. Oleh karena itu, Islam sering kali dipandang, bahkan dituduh dan dianggap sebagai agama yang radikal, musuh semua orang, ancaman terhadap demokrasi, anti perdamaian, cenderung menggunakan kekerasan, terlibat dalam tindakan terorisme, dan sejenisnya. Terdapat tiga alasan mendasar mengapa isu Islamophobia menjadi signifikan di Eropa pada saat ini (Pradipta, 2016). *Pertama*, dalam iklim masyarakat yang kian berkembang Islam digambarkan sebagai bagian yang terpisah dari kelompok masyarakat Eropa. Kebijakan pemerintah telah gagal menjamin kesetaraan hak-hak semua kelompok masyarakat. *Kedua*, Islam dijadikan sebagai kambing hitam atas resesi ekonomi dan dikonstruksikan sebagai sebuah ancaman. Konsep Islamisasi dikonstruksi oleh para aktor xenophobia menjadi agenda penting untuk melebih-lebihkan jumlah Islam di Eropa. *Ketiga*, tragedi

9/11, pembunuhan Theo Van Gogh, pembantaian charlie hebdo, serta serangkaian tragedi yang melibatkan Islam digunakan untuk membenarkan tindakan teroris oleh para pelaku membuat para masyarakat Eropa menjadi cemas dan takut (Titley & Lentin, 2021). Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para media untuk membentuk stereotip dan stigmatisasi mengenai image Islam yang dekat dengan gerakan-gerakan terorisme dan tindak kekerasan (Pradipta, 2016).

Fenomena Islamophobia saat ini mengarah pada sentimen anti-Islam adalah hasil dari manipulasi politik yang direncanakan oleh kelompok intelektual yang memiliki pandangan negatif terhadap Islam, dan mereka menggambarkan Islam sebagai sebuah ancaman signifikan. Sebagian memahami bahwa Islamophobia sebagai satu corak keberagamaan seseorang atau sekelompok orang di kalangan umat beragama yang meyakini cara pandang keagamaannya lebih benar dari yang lainnya. Biasanya, variasi dalam praktik keberagamaan ini cenderung menyoroti satu elemen khusus dari agama yang dianutnya, sementara mengabaikan elemen-elemen lainnya.

Munculnya sikap phobia, mengacu pada bentuk ketakutan dan kecemasan tertentu terhadap persoalan tertentu. Jika seseorang menghadapi situasi atau objek tertentu, maka dianggap kelompok tertentu lainnya sebagai berbahaya, dia akan merasa takut. Ketakutan yang berlebihan muncul karena adanya keinginan untuk mengantisipasi atau mencegah suatu kejadian yang tidak diinginkan, bentuknya dapat berupa penghindaran (Moordiningsih, 2015: 74). Dalam karya mereka yang berjudul "Islamophobia: Making Muslims the Enemy" (2008), Gottschalk dan Greenberg mendefinisikan Islamophobia sebagai "ketakutan sosial"

terhadap Islam dan budaya Muslim yang sebagian besar tidak memiliki dasar empiris. Konsep ini menggambarkan pandangan bahwa Islam dianggap sebagai ancaman utama terhadap bidang politik, budaya, dan agama, termasuk prinsip-prinsip seperti kebebasan politik, kesetaraan, demokrasi, individualisme, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan hak kepemilikan pribadi.

Fobia terhadap Islam tidak hanya menjaral seperti virus di pikiran sebagian masyarakat Barat, tetapi juga di kalangan warga negara yang merasa cenderung tidak mendukung keberadaan Islam sebagai agama mayoritas. Islam dianggap sebagai kekuatan yang mengancam kepentingan mereka. Oleh karena itu, Islam sering kali dipandang, bahkan dituduh dan dianggap sebagai agama yang radikal, musuh semua orang, ancaman terhadap demokrasi, anti- perdamaian, cenderung menggunakan kekerasan, terlibat dalam tindakan terorisme, dan sejenisnya. Terdapat tiga alasan mendasar mengapa isu Islamophobia menjadi signifikan di Eropa pada saat ini (opensocietyfoundations.org, 2015). Alasan pertama adalah timbulnya konflik yang kuat antara Pemerintah AS dan sekutunya, yang juga melibatkan media-media yang mendukung pandangan ini, dengan pihak-pihak tertentu yang dianggap sebagai penyebab utama terorisme global, terutama umat Islam. Hal ini juga berdampak pada pihak-pihak lain, termasuk organisasi-organisasi Islam di Indonesia, yang terpengaruh oleh propaganda anti-terorisme yang tersebar luas.

Pada skala global, Dunia Islam juga mengutuk tindakan sepihak yang dilakukan oleh AS dan sekutunya terkait terorisme, menganggapnya sebagai pelanggaran

terhadap prinsip kemanusiaan. Sikap kurang pengertian dan bahkan penolakan tidak hanya terhadap Pemerintah AS dan sekutunya, tetapi juga terhadap media yang ikut menyebarkan pandangan anti-terorisme global. Alasan kedua adalah bahwa Islam dijadikan sasaran atas terjadinya resesi ekonomi global. Sementara alasan ketiga adalah bahwa serangkaian peristiwa tragis yang melibatkan kelompok Islam disalahartikan sebagai tindakan terorisme. Ketiga faktor ini dimanfaatkan oleh media untuk membentuk stereotip dan pandangan negatif yang terus melekat pada kelompok Islam, di mana mereka dianggap memiliki hubungan dekat dengan kekerasan dan tindakan terorisme.

Stigmatisasi terhadap Islam dan umatnya, terutama dalam konteks gerakan-gerakan Islam radikal yang semakin mendapatkan ruang pergerakannya, dipengaruhi oleh dukungan media massa yang berpihak pada Barat (AS dan sekutunya). Media ini telah menciptakan opini publik yang melakukan "pembunuhan karakter" dengan cara menghancurkan reputasi, serta menerapkan strategi propaganda "penjulukan" yang menggambarkan Islam dan umatnya seolah-olah sebagai kelompok yang mendukung tindakan terorisme dalam usaha mencapai tujuannya. Sejumlah media Barat telah berhasil menciptakan suatu "realitas semu" atau "pseudo-reality" seputar isu terorisme. Pemberitaan yang berpihak ini sering kali menciptakan pandangan yang tidak objektif, yang dalam analisis media kritis disebut sebagai teknik "demonisasi". Ini merujuk pada upaya menyebarkan pandangan negatif secara massal dan sistematis terhadap suatu komunitas, sering kali melalui propaganda media dengan penggunaan teknik pencitraan dan imagologi (Ibrahim dan Romli, 2002: 65).

Pandangan Herbert Strentz dalam penelitiannya yang berjudul "News Reporters dan News Sources" (1989; dikutip dalam Ibrahim dan Romli, 2007: 28) berpendapat bahwa "terorisme bukanlah fenomena yang dominan dalam abad ke-20, melainkan tindakan ini menjadi lebih menonjol karena cakupan pemberitaan media." Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar informasi mengenai isu terorisme diperoleh melalui media. Media terus-menerus mengungkapkan kisah-kisah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembaca akan informasi tentang gerakan-gerakan Islam yang sering dikaitkan dengan tindakan kekerasan dan terorisme.

B. Strategi Adaptasi

Berdasarkan gagasan yang diungkapkan oleh Bannet, Ahimsa Putra sebagaimana dirujuk dalam Saharuddin (2007), ia menyatakan bahwa adaptasi mengacu pada proses penyesuaian terhadap perubahan kondisi. Adaptasi merupakan proses perubahan yang terjadi baik pada tingkat individu maupun pada interaksi individu dengan lingkungannya. Proses ini tentu memerlukan waktu yang cukup lama dan melibatkan serangkaian tindakan yang diulang secara berulang (Saharuddin, 2007).

Mengambil pedoman dari prinsip yang dirumuskan oleh para Ulama, dalam konteks adaptasi pada dasarnya adalah "*Al-Muhafadhab 'ala l-qadim al-shalih wa l-akhdzu bi l-jadid al-ashlah*," yang berarti "menjaga nilai-nilai yang baik dari masa lalu dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik."

Adaptasi merupakan respons, sikap, dan perilaku yang melibatkan perencanaan agar dapat mengantisipasi peristiwa di masa depan. Menurut Agung Tri Haryanto dan Eko Sujatmiko (2012), adaptasi mencakup penyesuaian terhadap lingkungan, pekerjaan, pembelajaran, proses perubahan, dan dampaknya pada individu dalam suatu kelompok sosial atau organisasi sosial. Ini dapat melibatkan aspek-etika seperti dalam konteks kehidupan berkeluarga dan tata krama dalam interaksi antar kelompok kerabat (Wahyuni, 2016).

Identifikasi Merton (1968) terdapat lima bentuk adaptasi yaitu:

1. *Konformitas* merujuk pada perilaku mengikuti sasaran dan metode yang telah ditetapkan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Inovasi mencakup tindakan mengikuti sasaran yang telah ditetapkan oleh masyarakat, namun melanggar aturan masyarakat (Yohana, 2000), seperti melakukan tindakan kriminal.
3. Ritualisme adalah pelaksanaan ritual budaya tanpa mengandung makna yang semula terkandung di dalamnya.
4. Pengunduran diri atau pengasingan diri, merujuk pada meninggalkan cara hidup yang merugikan, baik melalui cara yang umum diakui maupun upaya yang lazim digunakan untuk mencapainya.
5. Pemberontakan adalah ketika seseorang menarik diri dari tujuan konvensional sambil berusaha memperkenalkan tujuan atau metode baru, seperti dalam kasus reformasi agama.

Dalam konsep adaptasi menurut Bennett, adaptasi berarti mengatur diri sesuai dengan lingkungan alam dan budayanya. Pandangan mengenai adaptasi menurut Bennett ini, seperti yang dikutip dalam Saharuddin (2007: 46-47), terbagi menjadi tiga aspek. *Pertama*, ada adaptasi tingkah laku, yang melibatkan tindakan atau perilaku yang dipilih dengan mempertimbangkan hasil yang baik dan buruk yang mungkin terjadi. *Kedua*, terdapat adaptasi strategi, yang mencakup proses di mana manusia menanggapi situasi dengan mempertimbangkan pilihan yang telah diambil, dan memikirkan alternatif lain yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak akan menimbulkan masalah dengan pihak lain. *Ketiga*, ada adaptasi proses, yang melibatkan perubahan-perubahan yang muncul dengan menyesuaikan strategi yang telah dipilih, dan perubahan ini terjadi dalam jangka waktu yang lebih lama.

Bennett (1976: 249-250) menyatakan bahwa dalam pandangan ekologi, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor dalam lingkungan, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Hal ini perlu dilakukan dengan membedakan hal-hal yang dianggap penting, yang mungkin menjadi hambatan, dan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam perilaku manusia. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa struktur sosial dan budaya suatu kelompok merupakan hasil dari proses adaptasi manusia dalam menghadapi masalah, baik yang sudah terjadi maupun yang mungkin muncul di masa depan.

Mengacu pada konsep yang diungkapkan oleh Bannet, Ahimsa Putra, seperti yang dirujuk dalam Saharuddin (2007: 46-47), ia menjelaskan bahwa adaptasi merujuk pada proses penyesuaian terhadap perubahan

kondisi. Adaptasi ini adalah suatu proses perubahan yang terjadi baik pada individu itu sendiri maupun dalam interaksi individu dengan lingkungannya. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang (Saharuddin, 2007: 46-47). Adaptasi sosial merujuk pada penyesuaian diri dalam lingkungan sosial, termasuk dalam membentuk jaringan sosial guna memberikan dukungan psikologis dan membantu para migran agar dapat bertahan dalam lingkungan baru mereka.

Secara harfiah, strategi merujuk pada berbagai kombinasi aktivitas dan pilihan yang perlu dilakukan agar seseorang dapat memenuhi kebutuhannya dan mencapai tujuan hidupnya. Konsep strategi juga dilihat sebagai bagian dari pilihan yang rasional, di mana setiap pilihan, termasuk pilihan strategi, dibuat oleh individu berdasarkan pertimbangan yang rasional (Ulandary, 2018). Dalam kamus lengkap Indonesia, strategi diartikan sebagai metode atau taktik dalam perang (Ali dan Deli, 1997).

Secara umum, strategi adaptasi (*adaptive strategy*) dapat diartikan sebagai rencana tindakan yang dilakukan oleh manusia, baik dengan kesadaran penuh atau tanpa disadari, secara eksplisit atau implisit, untuk merespons berbagai kondisi internal atau eksternal yang mereka hadapi. Di sisi lain, Amri Marzali (2003) menjelaskan bahwa strategi adaptasi secara luas merujuk pada perilaku manusia dalam mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki untuk menghadapi masalah-masalah dengan memilih tindakan yang tepat sesuai dengan lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan ekologis tempat di mana mereka tinggal.

C. Diaspora

Istilah "diaspora" berasal dari Bahasa Yunani, yakni dari kata "*diaspeiro*," yang mengandung arti penyebaran (Karim, 2018). Kata "diaspeiro" pertama kali ditemukan dalam tulisan-tulisan Sophocles, *Herodotus*, dan *Thucydides* pada awal abad ke-5 sebelum masehi (Dufoix, 2009). Sementara itu, penggunaan istilah "diaspora" sebagai konsep yang lebih baru muncul pada abad ke-3 sebelum Masehi, tepatnya ketika para sarjana Yahudi terkemuka di Alexandria menerjemahkan Alkitab Ibrani ke dalam Bahasa Yunani. Dalam perjalanan sejarah, konsep diaspora pada mulanya merujuk pada penyebaran bangsa Yahudi, yang dianggap sebagai diaspora tertua di dunia (Elazar, 1991).

Diaspora merujuk kepada individu yang berasal dari suatu negara dan melakukan perpindahan ke luar negeri atas berbagai motif (Kenny, 2013). Diaspora di dasari tiga alasan, *pertama* alasan politis, seperti terkait dengan situasi konflik di negara asal. *Kedua*, faktor ekonomi dapat menjadi pendorong, misalnya berupa partisipasi dalam investasi yang kemudian diekspor ke negara tujuan atau kepentingan ekonomi lainnya. *Ketiga*, dorongan sosial dan budaya juga dapat mendorong diaspora, misalnya akibat tekanan sosial atau perbedaan budaya di negara asal (Galperin, Lituchy, Acquaaah, Bewaji, & Ford, 2014). Sebagai contoh konkret dari fenomena diaspora adalah kelompok etnis Thioghoa di Indonesia. Dalam dinamika ini, terdapat perbedaan antara negara asal (*home*) dan negara tujuan (*abroad*) dalam konteks mobilisasi individu ini (Yayusman & Lissandhi, 2022). Selain itu diaspora terjadi karena mereka belajar, baik karena penugasan oleh institusinya maupun atas inisiatif dan biaya sendiri, karena keinginan mengembangkan keahlian dan skill

keilmuan mereka. Mereka ini, pada umumnya setelah selesai studinya, pulang kembali ke tanah air, akan tetapi tidak sedikit yang kemudian mengembangkan karir profesionalnya dan pilihan pekerjaan sesuai dengan keahliannya di negara di mana ia menimba ilmu.

Migrasi internasional telah menjadi salah satu faktor utama dalam pengertian diaspora, merujuk pada perpindahan individu dari satu negara ke negara lainnya. Proses migrasi internasional sangat kompleks karena melibatkan perubahan lokasi tempat tinggal, tujuan migrasi, dan aspirasi untuk menetap atau kembali. Migrasi internasional juga menjadi elemen tak terpisahkan dari fenomena globalisasi, yang dicirikan oleh pertumbuhan, kedalaman, dan percepatan keterhubungan dalam berbagai aspek kehidupan sosial di seluruh dunia. Ketika semakin banyak orang meninggalkan tanah kelahiran mereka untuk menetap di tempat baru, hal ini menunjukkan peningkatan jumlah diaspora yang ada (Dewi dalam Annisa dan Afrizal, 2018).

Diaspora merujuk kepada individu yang berasal dari suatu negara dan melakukan perpindahan ke luar negeri atas berbagai motif. Pertama-tama, alasan di balik perpindahan ini dapat bersifat politis, seperti terkait dengan situasi konflik di negara asal. Kedua, faktor ekonomi dapat menjadi pendorong, misalnya berupa partisipasi dalam investasi yang kemudian diekspor ke negara tujuan atau kepentingan ekonomi lainnya. Ketiga, dorongan sosial dan budaya juga dapat mendorong diaspora, misalnya akibat tekanan sosial atau perbedaan budaya di negara asal. Sebagai contoh konkret dari fenomena diaspora adalah kelompok etnis Thioghoa di Indonesia. Dalam dinamika ini, terdapat

perbedaan antara negara asal (home) dan negara tujuan (abroad) dalam konteks mobilisasi individu ini (Kalra dkk., 2005, hal. 2).

Tentu tidak bisa dinafikan adanya diaspora karena mereka belajar, baik karena penugasan oleh institusinya maupun atas inisiatif dan biaya sendiri, karena keinginan mengembangkan keahlian dan skill keilmuan mereka. Mereka ini, pada umumnya setelah selesai studinya, pulang kembali ke tanah air, akan tetapi tidak sedikit yang kemudian mengembangkan karir profesionalnya dan pilihan job sesuai dengan keahliannya di negara di mana ia menimba ilmu.

Kebudayaan diaspora mengalami perkembangan melalui interaksi dan percampuran dalam komunitasnya, menghasilkan budaya hibrid yang merupakan konstruksi budaya baru. Diaspora mencerminkan semangat perjuangan kelompok global yang terpinggirkan. Berbeda dengan semangat kapitalisme yang berfokus pada komoditas ekonomi dan keuntungan finansial, diaspora lebih menitikberatkan pada semangat kelompok minoritas global. Dalam konteks transnasionalisme, muncul konsep denasionalisme ketika batasan negara semakin kabur. Denasionalisme berbeda dari diaspora karena diaspora mencakup unsur nasionalisme minoritas. Sebagai contoh nyata, etnis Tionghoa di Indonesia menjadi ilustrasi yang jelas. Mereka menghadapi kesulitan dalam diterima oleh masyarakat pribumi Indonesia dan sering kali disebut sebagai nonpribumi. Bahkan perubahan sebutan dari "Tionghoa" menjadi "China" menimbulkan konflik karena dianggap merendahkan. Dalam komunitas etnis Tionghoa di Indonesia, terdapat dua kategori: totok (pendatang baru) dan

peranakan (yang sudah lama tinggal di Indonesia dan lahir serta dibesarkan di sana) (Leo, 2010, hal. 183-185).

Dalam konteks diaspora Indonesia, pengumpulan data mengenai diaspora masih belum terlaksana dengan baik dan lengkap. Organisasi Indonesia Diaspora Network (IDN) diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mengumpulkan dan menyajikan data yang komprehensif mengenai diaspora Indonesia, termasuk informasi tentang lokasi penyebarannya dan karakteristik individunya. Data tersebut memiliki nilai yang sangat berarti karena dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana diaspora berkontribusi dalam proses pembangunan Indonesia, khususnya dari negara tempat tinggal mereka saat ini. Pengumpulan data mengenai diaspora memiliki manfaat besar dalam mengidentifikasi dan mengukur sumbangan diaspora terhadap kemajuan negara. Potensi yang dimiliki oleh diaspora perlu ditemukan dan dikerahkan untuk mendukung pembangunan nasional, sebuah pendekatan yang juga telah berhasil diterapkan oleh negara-negara seperti India dan China. Keduanya telah berhasil mengoptimalkan potensi diaspora mereka sebagai aset penting dalam pembangunan negara mereka (Romdiati, 2015, hal. 98-99).

Dalam perspektif sosiologis migrasi internasional terkait dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI), banyak penelitian menunjukkan bahwa pengaruh keluarga memiliki peran dominan dalam proses migrasi internasional para calon PMI yang mencari pekerjaan di luar negeri (Gheasi & Nijkamp, 2017). Dalam ontologi ini, keluarga PMI memilih untuk mengirim anggota keluarga mereka untuk bekerja di luar negeri sebagai strategi untuk mempertahankan

kelangsungan hidup dan meningkatkan taraf hidup keluarga mereka, khususnya dalam kelompok masyarakat yang kurang mampu secara finansial dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Fenomena ini membentuk pandangan bahwa menjadi seorang Pekerja Migran Indonesia di luar negeri adalah cara untuk meningkatkan status keluarga mereka, dan hal ini seiring waktu menjadi sebuah pola pikir dan akhirnya menjadi bagian dari budaya yang membentuk kebiasaan di kalangan masyarakat setempat.

D. *Multy Track Diplomacy*

Istilah "*track*" sering kali diartikan sebagai saluran atau jalur, terutama ketika digunakan oleh para pelaku dalam konteks hubungan internasional. Di dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional, para ilmuwan dan akademisi menekankan bahwa pelaku-pelaku ini sering kali didominasi oleh negara atau aktor-aktor negara. Namun, seiring perkembangan isu-isu yang timbul dalam masyarakat, terutama yang ditandai dengan runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989 dan berakhirnya Perang Dingin, pemahaman ini telah bergeser. Terlihat bahwa upaya mewujudkan perdamaian tidak lagi harus semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga dapat dilakukan oleh pelaku-pelaku selain negara, yang dikenal sebagai aktor non-negara (*non-state actor*). Konteks ini menggarisbawahi perubahan dinamika dalam hubungan internasional, di mana peran aktor-aktor non-negara semakin diakui dan menjadi signifikan dalam usaha mempromosikan perdamaian dan menangani isu-isu global.

Muncul istilah yang lebih inklusif, yaitu Diplomasi Multitrack (MTD), yang merupakan komponen dari struktur

yang dirancang untuk mencerminkan upaya diplomasi dengan tujuan mencapai perdamaian. Fungsi dan tanggung jawab para pelaku dalam kerangka MTD ini pada dasarnya memperluas aspek dari jalur pertama, yaitu negara.

MTD lahir sebagai hasil refleksi kolektif bahwa negara tidak mampu berdiri sendiri dalam mewujudkan perdamaian, dan menyadari bahwa isu-isu dalam Hubungan Internasional memiliki cakupan yang luas. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran pelaku lain di samping negara dalam upaya tersebut. Selain jalur pertama (*track one*), terdapat juga jalur kedua (*track two*) yang melibatkan para profesional atau organisasi non-pemerintah (NGO). Konsep jalur kedua diperkenalkan oleh Josep Montville pada tahun 1982 di Institute Pelayanan Luar Negeri (*Foreign Service Institute*) untuk menggambarkan metode diplomasi selain melibatkan aktor negara (jalur pertama). Jalur kedua dikenal juga dengan istilah organisasi non-pemerintah yang memiliki peran penting dalam menjalin interaksi antara berbagai pihak. Pihak-pihak dalam jalur kedua meliputi para profesional, individu, atau kelompok yang juga dapat disebut sebagai diplomat rakyat atau pelaku non-negara.

Berikut adalah kegiatan yang dijalankan dalam jalur kedua (*track two*):

- a. Mengurangi atau menghentikan pertikaian atau konflik antara kelompok imigran atau negara melalui peningkatan komunikasi, meningkatkan pemahaman, serta memperbaiki hubungan di antara pihak-pihak yang terlibat.
- b. Mengurangi intensitas eskalasi, rasa marah, ketakutan, dan kesalahpahaman melalui *pendekatan "humanizing the face of enemy"*. Ini dilakukan dengan memberikan kesempatan

yang setara kepada individu-individu untuk menyatakan pandangan mereka, dan menghargai sudut pandang tiap individu.

- c. Menyajikan alternatif pemikiran dalam proses pengambilan keputusan pemerintah atau jalur pertama (*track one*) terkait kebijakan luar negeri maupun domestik. Pendekatan ini melibatkan berbagai opsi diplomatik tanpa prasangka terhadap faktor-faktor seperti kondisi, ras, agama, dan sebagainya. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan didasarkan pada pertimbangan sosiologis mengenai pandangan masyarakat terhadap isu-isu yang muncul.

Seiring berjalannya waktu, berbagai jenis konflik bermunculan dengan keragaman bentuknya. Konflik ini tidak hanya terbatas pada pertikaian antara negara-negara, tetapi juga mencakup konflik internal dalam suatu negara. Contohnya adalah pertentangan antara kelompok suku atau agama di dalam negara tersebut. Konflik-konflik yang muncul dalam lingkup negara sering kali menyebar secara luas dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Penyelesaiannya memerlukan upaya yang ekstra keras dan memakan waktu yang cukup lama, karena adakalanya konflik internal ini bahkan bisa berujung pada perpecahan atau disintegrasi negara. Apabila situasi semacam ini terjadi, hal tersebut dapat sangat berbahaya bagi kesatuan suatu negara. Contoh nyata adalah perbedaan ideologi antara Jerman Barat dan Jerman Timur yang menyebabkan pembangunan Tembok Berlin yang memisahkan kedua negara tersebut. Sebagai contoh lain adalah konflik antara komunitas Islam dan Hindu di India, kekerasan berulang di negara-negara seperti Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Ethiopia, Sudan,

dan Afrika Selatan. Konflik-konflik semacam ini tentunya merugikan masyarakat dan berpotensi memicu perpecahan yang lebih luas.

Berdasarkan evolusi tersebut, para akademisi Hubungan Internasional (HI) mengembangkan konsep *Multi-Track Diplomacy* (MTD). *Multi-Track Diplomacy* adalah pendekatan yang mengakui bahwa diplomasi tidak terbatas pada negosiasi antara pemerintah secara resmi (*track 1 diplomacy*) (Raboin, 2014). Pendekatan ini mengakui bahwa konflik dan masalah global sering kali kompleks dan melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan kepentingan berbeda. Oleh karena itu, *Multi-Track Diplomacy* mengajukan bahwa penyelesaian konflik dan kerjasama internasional dapat dicapai melalui serangkaian jalur atau "track" yang berbeda, yang melibatkan berbagai aktor selain pemerintah (Böhmelt, 2010).

Menurut McDonald (2012) Konsep *Multi Track Diplomacy* terdiri dari sembilan *track diplomacy* yang dijelaskan sebagai berikut:

a. *Track One Diplomacy: Government*

Dalam jalur pemerintahan atau track ini, segala usaha penyelesaian konflik akan dijalankan melalui prosedur resmi dan melibatkan pemerintah serta institusi-institusi terkait yang tergabung dalam sebuah negara. Ini mencakup elemen-elemen dari cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Kaye, 2007).

b. *Non-government/professional or Peace making through Conflict Resolution*

Dalam upaya mencapai penyelesaian konflik, kelompok non-pemerintah atau individu ahli juga memegang peran penting dalam menciptakan kondisi yang serasi. Tindakan

yang mereka lakukan melibatkan langkah-langkah pencegahan, penyelesaian, dan pemeliharaan hubungan antar negara, yang dijalankan oleh pihak di luar lingkungan pemerintahan (Branco, 2011).

c. *Business or Peace-making through Commerce*

Peran penting juga dipegang oleh sektor bisnis dalam usaha meraih perdamaian. Hal ini terjadi melalui penyediaan peluang berbisnis bagi masyarakat. Dengan langkah ini, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi yang ada di tengah-tengah masyarakat (McDonald, 2012).

d. *Private Citizen or Peace-making through Personal Involvement.*

Dalam cakupan ini, mencakup tindakan yang diambil oleh individu atau komunitas untuk meraih perdamaian global. Partisipasi kelompok ini juga sering disebut sebagai "diplomasi rakyat" yang melibatkan beragam kegiatan, seperti program pertukaran pemuda, kelompok relawan, organisasi non-pemerintah (NGO), dan kelompok-kelompok lain yang dipenuhi oleh individu yang berbagi visi dan misi serupa dalam mewujudkan perdamaian (McDonald, 2012).

e. *Research, Training and Education or Peace-making through Learning.*

Dalam aspek kelima ini, para aktor yang terlibat memiliki kaitan erat dengan kalangan akademisi dan peneliti. Mereka menjalankan tiga peran yang saling terhubung, yaitu: *Penelitian*: Dilakukan oleh akademisi di perguruan tinggi dan kelompok think tank. Aktivitas ini melibatkan penyelidikan mendalam untuk menggali wawasan baru. *Pelatihan*: Ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu dan berfokus pada pembelajaran tentang strategi

bernegosiasi, diplomasi, mediasi, serta penyelesaian konflik. Selain itu, mereka berperan sebagai pihak ketiga dalam memfasilitasi penyelesaian masalah. *Pendidikan*: Meliputi rentang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Kurikulum yang disajikan difokuskan pada upaya membangun rasa toleransi dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) (McDonald, 2012).

f. *Activism or Peacemaking through Advocacy*

Dalam lingkup ini, peran aktor-aktor yang berusaha mewujudkan perdamaian dijalankan oleh mereka yang mengadvokasi hak-hak masyarakat dalam berbagai bidang. Contohnya, aktivis lingkungan, pejuang Hak Asasi Manusia (HAM), pahlawan kesetaraan hukum dan gender, serta beragam kelompok pejuang lainnya. Kelompok ini juga menerapkan strategi khusus dalam membela tujuan mereka, yaitu melalui proses advokasi (McDonald, 2012).

g. *Religious, or Peacemaking through Faith in Action.*

Pemimpin agama yang ada di berbagai negara, pada umumnya mungkin terlihat sebagai figur yang memberikan arahan bagi masyarakat yang memeluk agama yang sama. Namun, dalam Kerja Sama Diplomasi Antar Agama (MTD), peran pemimpin agama jauh lebih besar daripada hanya memberikan bimbingan kepada penganut agama mereka. Pemimpin agama memiliki dampak yang signifikan karena memiliki basis pengikut yang luas, sehingga suaranya memiliki pengaruh besar terhadap mereka yang mengikutinya. Dalam konteks MTD ini, peran pemimpin agama menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan perdamaian, terutama dalam

mengatasi konflik-konflik komunal yang terjadi di dalam suatu negara. Dalam pembahasan berikutnya, akan dijelaskan bagaimana pemimpin agama berperan dalam mengurangi konflik yang muncul di dalam suatu negara (McDonald, 2012).

h. *Funding or Peace-making through Providing Resources.*

Kelompok ini termasuk dalam kategori kelompok pendana dan sering diasosiasikan dengan para dermawan yang berperan dalam mendukung jalannya jalur atau pelaku-pelaku yang berupaya mewujudkan perdamaian. Banyak dari lembaga donor ini juga terlibat dalam kerjasama aktif dengan kelompok-kelompok masyarakat dalam mempromosikan isu-isu spesifik. Misalnya, isu lingkungan, Hak Asasi Manusia (HAM), dan kesetaraan gender (McDonald, 2012).

i. *Communications and the Media or Peacemaking through Information.*

Sebagai tahap akhir, peran media dalam menciptakan perdamaian memiliki signifikansi yang besar. Media bisa diibaratkan seperti koin dengan dua sisi, yakni sisi positif dan negatif. Media yang dikelola oleh individu yang mengedepankan perdamaian akan menghasilkan materi dan pesan yang mendorong upaya perdamaian. Sebaliknya, jika media dikelola oleh individu yang suka menciptakan konflik, maka media cenderung mengandung elemen provokasi. Terutama dalam era saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuat media dapat diakses dengan mudah di berbagai tempat dan waktu. Karena itu, peran media menjadi sangat penting dalam menentukan tingkat kedamaian suatu negara atau wilayah. Selain itu, media

juga berfungsi sebagai saluran komunikasi masyarakat, digunakan untuk menyampaikan pandangan, masukan, atau kritik kepada kelompok tertentu maupun pemerintah. Berikutnya, akan dijelaskan beberapa jenis media, termasuk media cetak, film, video, dan media elektronik dalam diskusi (McDonald, 2012).

BAB III

IMIGRAN MUSLIM DI BELANDA

A. Sejarah Masuknya Muslim di Belanda

Komposisi penduduk Belanda cukup menarik. Berdasarkan Statistic Netherlands Belanda dan Frisia menduduki 76,4%, Turki dan Kurdi 2,4%, Maroko dan Berber 2,3%, Indo dan Maluku 2,1%, Suriname 2,1%, Jerman 2,0%, dan Polandia 1,1%. (Welkom bij Holland, 2022). Sementara itu data keberagaman juga tidak kalah menariknya. Warga yang dinyatakan tidak beragama mencapai 54,1%, Katolik 20,1%, Islam 5%, dan lain-lain 5,9% (Statistics Netherlands, 2019).

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, dunia menyaksikan awal munculnya gelombang imigrasi yang signifikan. Pasca perang, negara-negara Eropa merasa perlu mendatangkan pekerja asing untuk memperbaiki infrastruktur dan struktur ekonomi mereka yang hancur akibat konflik. Banyak dari pekerja imigran ini berasal dari negara-negara Mediterania, termasuk Turki, Maroko, Algeria, dan Tunisia. Kebanyakan dari mereka direkrut sebagai pekerja kasar, tanpa memerlukan keterampilan khusus, dan oleh karena itu, sering dianggap sebagai tenaga kerja murah.

Negara-negara Eropa mengadopsi pendekatan yang berbeda-beda dalam menghadapi masuknya imigran ini. Prancis, Belanda, dan Britania Raya, sebagai contoh, mengambil pendekatan yang berbeda sesuai dengan konteks dan kebutuhan masing-masing negara. Gelombang imigran ini juga menyertakan individu-individu dari negara-negara

Islam seperti Turki dan Maroko. Beberapa kalangan ilmuwan menyambut datangnya imigran ini, terutama mereka yang berasal dari negara-negara Islam, dan melihat potensi positif yang bisa mereka bawa dalam berkontribusi pada perkembangan dan keragaman masyarakat Eropa.

Motif masuknya gelombang imigran muslim tersebut, menjadi pendorong umat muslim untuk bermigrasi dan alasan mereka memilih Belanda sebagai tujuan migrasi mereka. Karena Belanda berusaha membangun kembali negaranya yang telah hancur. Proses ini dimulai pada tahun 1945 hingga 1960. Sarana infrastruktur yang hancur seperti jembatan, jalan, rel kereta api, rumah-rumah, pabrik dan bangunan lainnya mulai diperbaiki. Pada tahun 1950, para imigran yang datang ke Belanda lebih didominasi oleh imigran dari negara-negara mantan kolonisasi Belanda seperti Indonesia dan Afrika Selatan. Proses migrasi yang terjadi di masa kolonisasi ataupun pasca kolonisasi lebih bersifat memaksa (*forced migration*) dan bukan didorong oleh kebutuhan para imigran. Migrasi ini lebih didasarkan kepada kepentingan negara penjajah tersebut dan para pengusaha asing.

Pada sekitar tahun 1973, Belanda menghadapi krisis fiskal yang berdampak signifikan pada perekonomian negara tersebut. Krisis ini juga berujung pada peningkatan drastis tingkat pengangguran di negara tersebut. Sebagai akibat dari krisis ini, Belanda berhenti mengimpor tenaga kerja dari luar negeri. Meskipun ada pekerja imigran yang memilih untuk kembali ke negara asalnya menghadapi kondisi sulit ini, imigran yang berasal dari Turki dan Maroko memilih untuk tetap tinggal di Belanda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan ini. Salah satunya adalah motif

politik dan ekonomi. Meskipun kondisi ekonomi sedang sulit, ada beberapa peluang dan kondisi yang tetap menarik bagi imigran dari Turki dan Maroko untuk bertahan di Belanda. Motivasi politik dan dorongan untuk mencari kehidupan yang lebih baik mungkin menjadi pertimbangan yang kuat dalam keputusan mereka untuk tetap tinggal di tengah krisis ekonomi tersebut. Alasannya, di negaranya asal mereka sendiri tidak kondusif. Tidak seperti di Prancis dan Jerman, pemerintah Belanda juga tidak pernah melakukan upaya memulangkan para pekerja imigran ke negara asalnya, bahkan pemerintah memberikan bonus bagi para pekerja imigran yang mau kembali secara sukarela ditolak oleh kaum imigran tersebut. Hal ini menyebabkan tingkat imigran gelap di Belanda meningkat tajam karena para pekerja yang didatangkan tersebut pada awalnya hanya ingin dipekerjakan untuk sementara waktu sehingga tidak melalui prosedur imigrasi yang resmi. Individu yang bermigrasi dari Turki dan Maroko telah mulai melaksanakan proses bersatu kembali dengan anggota keluarga mereka setelah mereka secara resmi memperpanjang izin tinggal di Belanda. Proses bersatu kembali ini melibatkan keputusan dari para migran tersebut untuk memboyong keluarga mereka dari negara asal ke Belanda, dengan tujuan untuk tinggal bersama dalam wilayah Belanda.

Namun, upaya reunifikasi keluarga yang dijalankan oleh para imigran ini semakin meramalkan keragaman di Belanda. Para imigran ini awalnya tiba di Belanda pada tahun 1980-an tidak hanya dalam kapasitas pekerja kontrak saja, tetapi juga sebagai pencari suaka politik. Penerimaan terbuka terhadap pencari suaka politik ini di Belanda didasari oleh prinsip toleransi kemanusiaan yang diterapkan di negara

tersebut. Proses migrasi untuk tujuan pencarian suaka politik ini muncul sebagai respons terhadap perbedaan signifikan di berbagai aspek seperti ekonomi, politik, dan sosial di tempat asal, yang berkaitan dengan lingkungan baik secara individu maupun masyarakat.

Proses pencarian suaka politik ke negeri Belanda bagi mereka, sebagai pilihan mempunyai beberapa alasan: pertama, adalah terjadinya perang yang tidak pernah selesai di negara asal kaum imigran tersebut. Perang yang terjadi membuat kehidupan kaum imigran tersebut menjadi tidak nyaman sehingga mereka memutuskan untuk mencari tempat baru yang lebih menjamin keamanan bagi mereka. Alasan kedua, adalah adanya konflik etnis yang terjadi di negara asal mereka. Konflik-konflik etnik tersebut lebih sering terjadi di negara-negara di benua Afrika.

Secara kasar diperkirakan bahwa setidaknya separuh dari negara-negara di Sub-Sahara Afrika, seperti Angola, Mozambik, Rwanda, Burundi, Zaire, Uganda, Ethiopia, Somalia, Sudan, Chad, Nigeria, Liberia, Zimbabwe, dan Afrika Selatan, sejak merdeka mereka telah mengalami konflik saudara atau kekerasan yang telah menyebabkan hilangnya ribuan nyawa akibat tindakan kekejaman yang didasarkan pada perpecahan etnis atau ras. Alasan ketiga adalah munculnya rezim otoritarian. Satu contohnya adalah pada saat ribuan pencari suaka yang berasal dari Iran datang ke Belanda karena merasa tersiksa oleh rezim Ayatollah Khomeini dan ribuan pengungsi dari Sudan yang ingin mencari perlindungan karena merasa tersiksa oleh rezim di negerinya sendiri.

Seiring dengan makin terbukanya gerbang perdagangan dunia dengan mudahnya akses sarana

transportasi yang makin lancar, telah menunjang proses migrasi tenaga kerja internasional. Pada tahun 1960, pemerintah Belanda memulai inisiatif mendatangkan pekerja migran dari beberapa negara, seperti Italia (1960), Spanyol (1961), Portugal (1963), Turki (1964), Yunani (1966), Maroko (1969), Yugoslavia (1970), Tunisia, dan Pakistan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Belanda. Pekerja migran ini umumnya tidak tunduk pada aturan imigrasi yang ketat. Secara teori, migrasi tenaga kerja ini terjadi sebagai akibat dari disparitas peluang ekonomi yang mendorong kesadaran akan perlunya migrasi ke wilayah tersebut, dengan harapan menemukan peluang kerja yang lebih baik.

Setelah Musim Semi Arab melanda sebagian besar negara Timur Tengah pada tahun 2012, stigma negatif dan Islamophobia di Eropa di kalangan imigran Timur Tengah berlanjut dan meningkat (Feldman, 2012). Hubungan antara Islam dan negara kembali menjadi perhatian serius. Dialektika antara negara Islam dan negara sekuler kembali dipertanyakan. Negara Islam menghadapi dilema antara menerapkan norma agama atau norma sekuler modern dalam bingkai negara-bangsa (Iqbal & Zulkifli, 2016). Maroko menjadi sorotan karena gerakan reformasi konstitusi yang masif, namun tanpa tumbangunya rezim dan memakan korban yang besar (Burdah, 2017). Sementara Indonesia dan Turki, negara mayoritas Muslim, menjadi model di mana agama dan sekularisme saling berhadapan tanpa konflik serius (Ahyar & Alfitri, 2019).

Di Belanda, terdapat dua kategori untuk penduduk yang tinggal di sana, yaitu masyarakat "Barat" (Barat-Eropa) dan "non-Barat" (non-Barat-Eropa). Klasifikasi ini diwakili

oleh istilah "Allochtonen" dan "Autochtonen". Menurut Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), "Allochtonen" digunakan untuk menggambarkan penduduk minoritas dengan latar belakang imigran dari daerah non-Barat. CBS mengklasifikasikan latar belakang "non-Barat" ini sebagai orang-orang yang memiliki keturunan dari negara-negara seperti Maroko, Antillen Belanda, Aruba, Suriname, Turki, dan lainnya. Sementara itu, istilah "Autochtonen" merujuk kepada penduduk mayoritas dan/atau individu yang kedua orang tuanya lahir dan dibesarkan di Belanda, serta mengadopsi gaya hidup dan pola pikir umumnya seperti masyarakat Eropa/Barat atau orang-orang dengan latar belakang imigran dari daerah Barat-Eropa.

Allochtonen yang sudah menetap di negara Belanda merasa perlu untuk selalu melestarikan kebudayaannya agar tidak hilang di negeri Belanda. Maka dari itu, masyarakat imigran banyak mendirikan organisasi-organisasi seperti, sekolah-sekolah muslim, CMO, CGI, UMMON, ULAMON dan lain-lain. Organisasi-organisasi tersebut didirikan untuk melestarikan dan mempertahankan identitas primordialisme Allochtonen tersebut.

Frits Bolkestein berpendapat bahwa terdapat sekurang-kurangnya 6 (enam) faktor yang mengakibatkan tidak berjalannya proses integrasi di Belanda, yaitu: pertama, adalah para imigran lebih sulit memperoleh pekerjaan dibanding dengan warga asli Belanda. Faktor ini tercermin dalam penambahan jumlah warga imigran yang menganggur, yang meningkat dari 9% pada tahun 2001 menjadi 16% pada tahun 2004. Kedua, masyarakat imigran yang berasal dari Turki dan Maroko pada tahun 2001, sebanyak 90% dari data yang tersedia memilih untuk menikah dengan rekan sebangsa

imigran dari Turki dan Maroko, dan 60% di antara mereka mengambil langkah lebih jauh dengan membawa pasangan langsung dari negara asal mereka. Faktor ini menunjukkan bahwa masyarakat imigran asal Turki dan Maroko tidak mau menjalin ikatan keluarga dengan warga asli Belanda dan lebih memilih untuk melestarikan keaslian ras mereka.

Ketiga, yaitu Allochtonen yang berasal dari negara Turki dan Maroko lebih senang meluangkan waktu senggang mereka dengan berkumpul sesama imigran dibandingkan dengan warga asli Belanda. Keempat, yaitu 18% dari tindakan kriminal yang terjadi di Belanda dilakukan pemuda-pemuda keturunan negara Turki dan Maroko yang berusia antara 18-24 tahun. Kelima, yaitu sekitar 40% masyarakat imigran Turki dan 45% masyarakat imigran Maroko kurang mendapatkan pendidikan yang memadai. Keenam, yaitu kira-kira 50% masyarakat imigran yang berasal dari negara Turki dan Maroko menilai bahwa gaya hidup warga asli Belanda tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang mereka anut.

Proses integrasi yang berjalan di Belanda tidak hanya diakibatkan oleh pandangan Allochtonen yang merasa tidak bisa menerima kebudayaan dan gaya hidup warga Belanda. Pandangan Autochtonen atau masyarakat Belanda yang mempunyai latar belakang masyarakat barat terhadap Islam juga menjadi faktor pemicu gagalnya proses integrasi masyarakat Belanda yang multikultural. Pandangan Autochtonen yang masih beranggapan bahwa kebudayaan bangsa Eropa lebih tinggi daripada kebudayaan Islam membuat imigran muslim enggan berinteraksi dengan Allochtonen dan ada kecenderungan untuk melakukan tindakan-tindakan diskriminasi.

Dalam laporan yang dibuat oleh Rotterdam Youth Survey, 50% kaum minoritas di negara Belanda yang beragama Islam mengaku bahwa mereka mendapatkan perlakuan diskriminasi, bahkan 15% dari jumlah mereka mengaku bahwa mereka sering mendapatkan tindakan tersebut. Perasaan ketakutan warga Belanda terhadap muslim juga menjadi salah satu pemicu gagalnya proses integrasi. Kaum muslim yang identik dengan kegiatan-kegiatan terorisme yang terjadi di negara-negara barat menjadi alasan mendasar ketakutan warga Belanda terhadap umat Islam.

Konflik-konflik yang bermunculan sebagai akibat tidak berjalannya proses integrasi di negara Belanda ternyata ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi tersebut akibat terjadinya konflik-konflik yang terjadi. Data-data yang diperoleh bahwa terdapat kelompok kaum mayoritas di Belanda yang antipati terhadap keberadaan muslim dan memberikan dukungannya kepada Partij voor de Vrijheid (PVV). PVV adalah sebagai salah satu partai politik di Belanda yang beraliran ekstrim kanan. Partai politik ini dipimpin oleh Geert Wilders yang dikenal sebagai politikus yang anti terhadap agama Islam. Dukungan tersebut datang kepada PVV tidak hanya dari warga yang antipati terhadap Islam tetapi juga dari kaum buruh yang merasa tidak pernah dilibatkan dalam politik.

Kendatipun Pemerintah Belanda telah berusaha menetapkan kebijakan Wet Inburgering Nieuwkomers pada tahun 1998, namun kebijakan tersebut tidak mampu meningkatkan perkembangan integrasi masyarakat muslim tersebut. Faktor ini bisa dilihat dari maraknya tindakan diskriminasi yang sering diterima oleh Allochtonen. Eskalasi

ketakutan warga Belanda terhadap Islam semakin meningkat sejak terjadinya peristiwa terorisme di Amerika Serikat pada tanggal 11 September tahun 2001. Peristiwa ini turut mempengaruhi pandangan terhadap umat muslim di Belanda, akibat peristiwa tersebut.

Masalah yang muncul pasca dikeluarkannya Wet Inburgering Nieuwkomers yang sudah direvisi pada tahun 2007 bukan lagi menjadi masalah Allochtonen yang memiliki pendapat berbeda dengan Autochtonen sehingga menjadikan Allochtonen tersebut susah untuk berintegrasi dengan masyarakat Belanda seutuhnya. Persoalan yang terjadi saat ini adalah pandangan yang masih beranggapan bahwa Islam identik dengan kegiatan terorisme dan Islam tidak bisa berdiri sejajar dengan ideologi liberalisme yang diyakini negeri Belanda masih menjadi entitas penghalang bagi proses integrasi masyarakat muslim dengan warga Asli Belanda.

B. Fenomena Islamophobia di Belanda

Islamophobia di kawasan Eropa sudah berkembang cukup lama dan fenomena tersebut bukanlah fenomena baru. Meskipun awalnya hanya berupa fenomena kebencian terhadap Islam dan umat Islam di wilayah tersebut, kebencian masyarakat gereja terhadap Islam sudah dimulai sejak abad ke-8. Kebencian itu diwujudkan dalam berbagai bentuk, salah satunya dalam perang salib. Secara konseptual, Islamophobia mulai dikembangkan oleh para aktivis politik pada tahun 1990-an sebagai bagian dari retorika mereka untuk menarik perhatian konstituen. Persoalan utamanya adalah bagaimana memandang Islam dan umat Islam di

negara demokrasi liberal sebagai sesuatu yang meresahkan masyarakat sekitar. Selain itu, dari konsep politik, Islamophobia telah menjadi objek kajian ilmiah-analitik untuk mengungkap asal-usul, pembahasan dan akibatnya bagi masyarakat Muslim dan dunia (Bleich, 2011: 1582).

Semangat yang menentang agama Islam semakin menguat setelah peristiwa ledakan pesawat di atas Menara Kembar World Trade Center (WTC) pada 11 September 2001 di Amerika Serikat; serta serangan bom bunuh diri di London, Inggris, dan Spanyol pada tahun 2005. Islamophobia meningkat secara signifikan sejak peristiwa 9/11, yang awalnya sering terlihat dalam wacana politik (Al-Ansi et al., 2022). Selain itu, pembunuhan politisi Belanda Pim Fortuyn oleh seorang warga negara Belanda berdarah Maroko juga memberikan dorongan pada semangat tersebut. Insiden teror lainnya mengikuti ini di masyarakat Eropa. Akibatnya, insiden tersebut telah mempengaruhi mereka untuk memandang Islam dan Muslim dengan kecurigaan dan kecemasan. Kelompok sayap kanan konservatif kemudian memanfaatkan sentimen semacam ini untuk menciptakan iklim kecurigaan, prasangka, dan ketakutan terhadap umat Islam (Arif, 2015). Sebuah LSM yang peduli dengan pemantauan Uni Eropa merilis laporan tentang indikasi kuat Islamophobia di semua negara Eropa, bahkan menyebutnya sebagai kondisi yang tidak menguntungkan (Kalmar, 2018).

Beberapa partai politik konservatif di negara-negara Eropa terus mengembangkan isu anti-Islam melalui kontrol media dan pendekatan sistem pemerintahan dengan diplomasi global. Bahkan negara-negara tanpa peristiwa pahit pun menyebarkan Islamophobia. Seperti yang terjadi di Polandia, negara dengan jumlah umat Islam yang sangat

terbatas, Islamophobia juga muncul. Kondisi ini disebut Wloch, sebagaimana dikutip Alfin (2018:208), Islamophobia tanpa komunitas muslim atau platonis. Dalam hal ini, ketakutan dan kecemasan masyarakat Barat dan Eropa yang berlebihan terhadap Islam bukan karena tindakan fisik, seperti perang dan teror, tetapi lebih disebabkan oleh “kepanikan moral”. Kepanikan moral ini disebabkan terganggunya kebebasan berekspresi, kesetaraan gender, dan toleransi sebagai simbol masyarakat modern. Hal tersebut dianggap terancam oleh umat Islam yang berkembang pesat di beberapa negara Eropa (Sayyid, 2014).

Frits Bolkenstein salah seorang politikus Belanda yang menjabat sebagai Minister Van Defensie atau Menteri Pertahanan negara Belanda periode 1988-1989. Bolkenstein salah seorang politikus yang pandangannya antipati terhadap agama Islam. Pernyataan yang pernah dimuat dalam artikel de Volkskrant pada tanggal 12 September 1991. Dalam tulisannya Bolkenstein berpandangan bahwa aturan dalam agama Islam tidak selaras dengan nilai-nilai liberalisme. Islam yang mengatur semua aspek kehidupan kaum muslimin telah membentuk negara-negara Islam yang menjalankan aturan Sistem hukum Islam dilihat sebagai faktor yang membatasi kepatuhan warga negaranya terhadap negara dan menghambat hak mereka untuk berbicara dan mengemukakan pendapat. Selain itu, Bolkenstein juga berpendapat bahwa agama Islam mempromosikan perlakuan yang merendahkan terhadap perempuan dan dianggap sebagai ancaman serius yang setara dengan bahaya komunisme.

Bolkenstein juga berpandangan bahwa semboyan integrasi Belanda yang berbunyi “integratie met behoud van

eigen identiteit”(Integrasi dengan kelestarian budaya sendiri) tidak mendapat dukungan. Menurut Bolkenstein, bahwa setiap integrasi pasti akan berdampak membawa perubahan, karena itu faktor yang terpenting bagi masyarakat Barat adalah keberhasilan melestarikan nilai-nilai kebebasan dan persamaan derajat saat budaya lain mulai masuk dan “menantang” nilai-nilai tersebut. Pernyataan Bolkenstein ini didukung penuh oleh Sekretaris Jenderal North Atlantic Treaty Organization (NATO) periode 1994-1995 dan Politisi asal Belgia, Willy Claes.

Beberapa partai politik konservatif sayap kanan di negara-negara Eropa tanpa henti melancarkan dan terus melancarkan isu anti-Islam melalui kontrol media dan pendekatan sistem pemerintahan dengan diplomasi global. Bahkan negara-negara yang semula tanpa peristiwa apapun pun menyebarkan Islamophobia. Seperti yang terjadi di Polandia, negara dengan jumlah minoritas umat Islam yang sangat terbatas, gerakan Islamophobia juga muncul. Kondisi disebut oleh Wloch, sebagaimana dikutip Alfin (2018:208), Islamophobia tanpa komunitas muslim atau platonis. Dalam hal ini, ketakutan dan kecemasan warga negara Barat dan Eropa terlalu berlebihan terhadap Islam bukan karena tindakan fisik, seperti perang dan teror, tetapi lebih disebabkan terhadap faktor “kepanikan moral”. Faktor kepanikan moral tersebut lebih disebabkan terganggunya kebebasan berekspresi, kesetaraan gender, dan toleransi yang di anut sebagai simbol masyarakat modern, yang dianggap akan terancam oleh keberadaan umat Islam yang berkembang pesat di beberapa negara Eropa (Sayyid, 2014).

Perkembangan terhadap Islamophobia di Belanda pergerakannya mengalami pasang surut tergantung situasi

yang melatar belaknginya. Kadang kala terjadi penguatan di tengah situasi politik. Faktor lain menguatnya eskalasi Islamophobia di Belanda juga disebabkan oleh faktor media yang sengaja melancarkan aksi dan sengaja membackup isu seputar terorisme, framing yang dibuat bahwa pelakunya adalah umat Islam dan berasal dari negara-negara Islam. Mereka hanya mendapatkan informasi sepihak tentang Islam dan Muslim melalui berita dan media sosial. (Subadi, komunikasi pribadi, 25 Juli 2020).

Media berperan penting dalam menyebarkan dan memframing informasi positif dan negatif. Sesuai dengan kepentingannya, media dapat menjangkau massa yang besar dengan cepat serta membuat seseorang menjadi populis dengan paparan media yang terus menerus. Beberapa ulama menyatakan bahwa media sering sengaja membuat framing sehingga menimbulkan kesalahpahaman terhadap ajaran Islam. Dampak ikutannya, mereka membuat jarak dan tidak jarang sikap diskriminatif terhadap orang-orang yang menganut agama Islam. CNN.com, merupakan corong media representasi Barat. CNN.com seringkali mencari posisi berlawanan dengan Islam dan berlawanan dengan al-Jazeera.com. Di antara media-media yang cenderung memposisikan Islam secara berimbang adalah Kompas.com dari Indonesia (Yuliarti et al., 2017: 290).

BAB IV

DIASPORA MUSLIM INDONESIA MENGHADAPI ISLAMPHOBIA

A. Perkembangan Islamophobia di Belanda

Aktivitas migrasi penduduk antar negara (transnasional) menggambarkan sejauh mana keterlibatan suatu negara, terutama melalui langkah-langkah pengiriman dan penerimaan imigran. Negara, sebagai lembaga resmi, berperan sebagai pendorong yang memfasilitasi akses individu atau kelompok dalam menjalani proses migrasi. Ini terjadi melalui perjanjian dua hala yang menjadi tanggung jawab politik negara secara esensial. Khususnya antara negara penerima dan negara pengirim, ini menjadi salah satu strategi diplomasi untuk memenuhi aspirasi dan kepentingan politik negara. Perpindahan imigran dari satu negara ke negara lain bertujuan mencari kehidupan baru dan perlindungan politik (dalam bentuk suaka) di tempat baru. Dalam hal ini, mereka membawa impian dan harapan bahwa pemerintah dan masyarakat di negara tujuan akan menyambut mereka dengan prinsip-prinsip dasar atau warisan budaya mereka. Imigran dengan tulus berharap bahwa identitas budaya kelompok etnik mereka akan diterima dan diberikan perlindungan politik di negara yang baru. Mereka juga berkeinginan untuk diberikan identitas formal yang sama dalam konteks hukum dengan warga negara lokal, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari komunitas pendatang.

Pergerakan migrasi yang timbul dalam era restrukturisasi ekonomi pasca Perang Dunia II dimulai dengan masuknya pekerja migran ke sejumlah wilayah di Eropa Barat (seperti Jerman dan Belanda). Dimulai dari migrasi pekerja asing (yang sering disebut "*guest workers*") melalui perjanjian bilateral resmi dengan negara-negara pengirim tertentu. Awalnya, arus pekerja migran berasal dari negara-negara di bagian Selatan Eropa, termasuk Spanyol, Italia, dan Yunani. Kemudian, sekitar tahun 1960-an, fokus perekrutan tenaga kerja migran mulai beralih ke negara-negara di wilayah Mediterania, khususnya Turki, Maroko dan Tunisia. Ketika resesi ekonomi melanda pada tahun 1966, pemerintah merencanakan repatriasi sejumlah pekerja migran ke negara asal mereka. Namun, setelah perekonomian Belanda mulai pulih pada tahun 1968, arus tenaga kerja kembali mengalir lagi. Namun, pergerakan ini terhenti kembali akibat krisis minyak pada tahun 1973 (Vermeulen, 2000: 54).

Masing-masing Imigran khususnya warga muslim yang menetap di Belanda, masing-masing membawa keunikan dan corak kehidupan tersendiri. Imigran Turkey misalnya, mereka yang menetap di Belanda. Bagi mereka kebanyakan mempertahankan kepentingan ekonominya sebagai pedagang tidak terganggu, maka imigran Turkey tidak mempermasalahkan adanya pergolakan politik apapun, sepanjang tidak mengganggu ekonomi mereka sebagai pedagang. Sedangkan bagi imigran asal Maroko, mereka lebih turut andil dalam pergerakan politik, bahkan banyak dari mereka yang mengisi ruang-ruang politik, sedangkan untuk imigran dari Indonesia, untuk memilih hidup tenang sepanjang fasilitas negara diberikan dengan layak.

Hasil wawancara dengan Nur Hasyim

“kunjungan kenegaraan oleh Raja Betrix ke Kerajaan Maroko, bermaksud untuk memulangkan imigran Maroko ke negerinya dan berterima kasih atas nama kerajaan Belanda. Akan tetapi oleh Raja Maroko disampaikan bahwa dahulu, kami mengirim tenaga kerja ke Belanda dengan tenaga kerja yang bagus, maka kalau sekarang kerajaan Belanda mau memulangkan mereka yang sudah menetap turun temurun dan sudah menjadi generasi ketiga mereka, maka kembalikan mereka generasi yang dulu kami kirimkan (Wawancara Personal, 2023).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kunjungan kenegaraan oleh Raja Beatrix dari Belanda ke Kerajaan Maroko bertujuan untuk membahas pemulangan imigran Maroko yang telah menetap di Belanda, bahkan hingga generasi ketiga. Raja Maroko mengungkapkan pandangan bahwa dahulu Maroko mengirimkan tenaga kerja yang baik ke Belanda, dan jika Belanda ingin memulangkan mereka yang telah menjadi generasi kedua atau ketiga, maka sebaiknya Belanda mengembalikan mereka ke generasi pertama yang pernah dikirim oleh Maroko. Hal ini mencerminkan perdebatan dan kompleksitas dalam hubungan antara negara-negara terkait imigrasi dan pemulangan imigran. Pernyataan Raja Maroko menunjukkan pandangan bahwa mereka menganggap kontribusi yang telah diberikan oleh generasi imigran pertama asal Maroko menjadi faktor yang penting dalam perdebatan tentang pemulangan.

Nur Hasyim menambahkan lebih lanjut, bahwa

“Islamophobia bagi diaspora muslim Indonesia, sesungguhnya hanya terasa pada awal-awal munculnya isu anti Islam saja. Selanjutnya bagi diaspora muslim Indonesia, menganggap tidak ada dampak apapun, karena kami sejak awal melakukan dialog dengan pemerintah Belanda, bahwa Islam yang kami anut dan yakini adalah Islam yang moderat, tidak seperti pemahaman mereka yang melancarkan gerakan dan berimplikasi munculnya Islamophobia. Bahkan pemerintah Belanda sendiri menyatakan bahwa sudah mengenal dengan baik corak Islam Indonesia sejak beberapa abad karena pernah hidup berabad-abad lamanya sejak pendudukan Belanda di Indonesia (Wawancara Personal, 2023).

Dari hasil wawancara di atas mencerminkan bahwa diaspora muslim Indonesia merasa bahwa Islamophobia hanya terasa pada awal-awal munculnya isu anti-Islam. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa ketika isu-isu tersebut pertama kali muncul, ada ketidakpastian atau ketegangan dalam komunitas Muslim Indonesia di Belanda. Diaspora Muslim Indonesia telah melakukan dialog dengan pemerintah Belanda untuk menjelaskan bahwa Islam yang mereka anut adalah Islam moderat dan berbeda dari pemahaman ekstremisme. Ini menunjukkan upaya komunikasi antara komunitas Muslim Indonesia dan pemerintah Belanda untuk memahami perbedaan dalam pemahaman agama.

Pemerintah Belanda telah mengakui pemahaman Islam moderat yang dipraktikkan oleh diaspora Muslim

Indonesia. Bahkan, disebutkan bahwa pemerintah Belanda telah mengenal corak Islam Indonesia sejak beberapa abad karena sejarah panjang hubungan antara Belanda dan Indonesia. Dengan demikian diaspora Muslim Indonesia di Belanda telah berusaha untuk menjelaskan pemahaman agama mereka kepada pemerintah Belanda dan bahwa Islamophobia hanya terasa pada awal-awal munculnya isu tersebut.

Dua pola utama menggambarkan tren migrasi di negara-negara Eropa Barat, termasuk Belanda. Pertama, terdapat proses restrukturisasi ekonomi negara setelah Perang Dunia II, yang menjadi pemicu masuknya tenaga kerja migran ke Belanda dan negara-negara Eropa lainnya. Pola ini berfungsi sebagai katalisator dalam pergerakan migrasi. Kedua, terjadi perubahan dan kesepakatan dalam konfigurasi serta struktur perekonomian di wilayah Eropa, yang dipicu oleh pembentukan Uni Eropa (UE). Perubahan ini juga memainkan peranan penting dalam membentuk pola migrasi di wilayah tersebut. Perubahan tren migrasi warga negara selanjutnya terlihat dalam bentuk perpindahan keluarga, yang mencakup reunifikasi keluarga dan pembentukan keluarga baru. Ini menandai langkah awal dalam proses penempatan kembali imigran Muslim beserta keluarga mereka di Belanda. Selanjutnya, tren migrasi juga mencakup individu yang mencari suaka politik dan pengungsi, yang ikut berkontribusi pada peningkatan jumlah penduduk imigran di Belanda. Peningkatan ini dalam migrasi penduduk dapat menghadirkan tantangan bagi sistem integrasi sosial di negara tersebut. Salah satu tantangannya adalah rendahnya tingkat integrasi di pasar tenaga kerja (White, B. Jenny, 1997; 755-756).

Rendahnya tingkat integrasi menyebabkan mereka perlu mencari tempat untuk membentuk komunitas baru. Karena itu, mereka merasa penting untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan mengintegrasikan diri dengan budaya negara tersebut. Dalam perspektif Penninx, integrasi adalah sebuah proses di mana seseorang berusaha menjadi anggota yang diakui dan diterima, serta menjadi bagian yang terpadu. Ini berarti mereka harus mampu beradaptasi dengan budaya lokal dan membuat keberadaan mereka diterima oleh masyarakat setempat. Definisi lengkap integrasi adalah

“Sebuah proses adaptasi yang dilakukan oleh pendatang yang meliputi dua hal yaitu individu dan kelompok masyarakat di mana para pendatang harus membuat dirinya berada pada posisi yang dapat diterima oleh komunitas di mana dia berada” (Gusnelly, 2010).

Dalam situasi ini, pendatang asing perlu menjalani proses asimilasi dan menerima norma-norma yang berlaku dalam komunitas baru yang mereka masuki. Proses integrasi harus berlangsung secara bertahap, di mana setiap individu perlu memahami konteks dan karakteristik budaya di lingkungan baru mereka.

Masyarakat Belanda sebenarnya memiliki kecenderungan yang lebih cepat dan inklusif dalam menerima imigran sebagai warga asing pendatang. Pada sekitar tahun 1980-an, pemerintah Belanda juga memudahkan proses permohonan naturalisasi bagi imigran, sesuai dengan penelitian oleh Ching Lin Pang (2002); Muskens, George (2005). Di sisi lain, pada era 1980-an, terjadi penguatan kebijakan imigrasi terhadap orang asing

atau pendatang. Dengan kendali dari negara, mereka yang datang dari luar Eropa, sesuai dengan European Economic Area (EEA), hanya diizinkan bekerja dengan kontrak kerja singkat. Melalui batasan ini, pemerintah Belanda bertujuan secara perlahan mengurangi jumlah orang asing yang bekerja di negara tersebut. Langkah ini membantu proses pemulihan ekonomi pasca krisis minyak tahun 1973 dan 1983 (Roodenburg, Euwals, dan Terrele, 2004; 378).

Sejalan dengan ini, pemerintah Belanda mulai mengimplementasikan kebijakan-kebijakan integrasi. Secara bertahap, pemerintah mendorong imigran pendatang untuk terlibat dalam proses integrasi dengan budaya dan masyarakat setempat. Ini merupakan bagian penting dalam rangka menjamin kesuksesan program yang telah diatur oleh negara.

Perubahan ini tidak hanya berasal dari inisiatif di dalam parlemen negara tersebut, tetapi juga dipicu oleh perubahan struktur dan konfigurasi politik dan ekonomi di Eropa. Perubahan dalam konfigurasi politik dipengaruhi oleh kesepakatan pembentukan Uni Eropa (UE). Kebijakan baru yang dirancang oleh UE mewajibkan setiap negara anggota untuk menyusun kebijakan yang terintegrasi dengan kebijakan UE. Setiap negara anggota diizinkan untuk merumuskan kebijakan sendiri selama tetap berada dalam kerangka integrasi UE. Sejak Traktat Amsterdam tahun 1997, kebijakan tersebut disetujui secara bersama oleh negara-negara anggota. Pada titik ini, disepakati bahwa kebijakan migrasi warga negara dari negara-negara anggota harus mengacu pada kebijakan migrasi yang ditetapkan oleh pemerintah UE, termasuk kebijakan terkait penerimaan tenaga kerja asing.

Kebijakan integrasi yang diterapkan oleh pemerintah tidak dilakukan tanpa alasan, melainkan karena terdapat kepentingan bersama yang signifikan yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Selain mengakui keberadaan individu sebagai imigran, kebijakan ini juga berfungsi sebagai sarana untuk menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga, baik di tingkat pemerintah maupun non-pemerintah. Strategi adaptasi yang dibangun melalui interaksi dengan negara menunjukkan dukungan mereka terhadap jaringan lintas negara (transnasional) berdasarkan identitas atau kepentingan khusus. Jika upaya integrasi dengan negara tidak berhasil, individu akan dihadapkan pada pilihan untuk bergabung kembali dengan komunitas asal mereka.

Faktor ekonomi dan latar belakang budaya kelompok imigran tampak menjadi isu kompleks di Belanda. Kondisi tanah Belanda menjadi arena sosial di mana berbagai pelaku sosial dengan latar belakang yang beragam memiliki hak dan kontribusi dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan budaya. Setiap kelompok memiliki hubungan yang unik sesuai dengan ciri khasnya. Keanekaragaman para pelaku sosial ini membawa nilai budaya khas yang masih erat terhubung dengan asal negara mereka. Identitas etnis imigran juga dibentuk oleh nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas lingkungan mereka. Pengakuan terhadap lingkungan ini, dengan kekhasan dan keunikan yang ada, merupakan hasil dari interaksi dan dinamika dengan kelompok lainnya, serta bagaimana kelompok tersebut mengenali diri mereka sendiri dan bagaimana pandangan kelompok lain terhadap mereka (Barth, 1988).

Munculnya generasi ketiga diakui sebagai inovator dalam sektor pendidikan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai

budaya Eropa. Ini berarti bahwa secara umum, terutama untuk imigran generasi pertama dari Turki di wilayah Eropa, khususnya di Belanda, telah membentuk sebuah komunitas diaspora yang mengalami perpecahan yang signifikan. Sehingga, batas-batas identitas tradisional yang sebelumnya menjadi ciri khas kelompok ini telah mengalami akulturasi budaya dalam bentuk kehidupan yang baru. Proses fragmentasi ini terjadi dalam dua konteks, yaitu dalam hubungan antara imigran pendatang dengan masyarakat tuan rumah, dan juga di dalam komunitas imigran itu sendiri. Mayoritas dari mereka, yang lahir, tinggal, dan mendapat pendidikan di Belanda, cenderung berpikir bahwa identitas sebagai warga Turki tidak lagi begitu penting. Keturunan dari generasi ketiga dan seterusnya dari imigran pendatang Turki tidak lagi hanya mengandalkan budaya asal negara mereka sebagai satu-satunya acuan dalam membentuk identitas mereka. Situasinya berbeda dengan imigran pendatang dari Maroko yang masih sangat mengakar pada identitas budaya asal mereka.

Belanda adalah negara dengan masyarakat yang mempunyai pikiran terbuka dan menerima imigran. Namun demikian, bukan berarti Islamophobia tidak terjadi di negeri kincir angin. Hal ini disampaikan oleh narasumber penelitian yang menyatakan bahwa

Beberapa aksi yang terindikasi sebagai gerakan Islamophobia telah kerap kali terjadi, seperti rekrutmen tenaga kerja dari nama yang tidak ada family Belanda, jarang sekali diterima sebagai karyawan (Zhara, komunikasi personal, 13 Juli 2023).

Hasil wawancara di atas memberikan informasi bahwa terdapat tindakan-tindakan yang terindikasi sebagai gerakan Islamophobia yang sering terjadi. Contohnya adalah rekrutmen tenaga kerja dari individu yang memiliki nama yang tidak terdengar seperti keluarga Belanda, dan mereka jarang diterima sebagai karyawan. Hasil wawancara di atas mengindikasikan bahwa ada prasangka atau diskriminasi terhadap individu dengan latar belakang etnis atau agama tertentu, yang dalam hal ini tampaknya terkait dengan Muslim atau komunitas imigran tertentu. Hal ini mencerminkan masalah penting terkait dengan diskriminasi dalam dunia kerja yang perlu diperhatikan dan diatasi.

Ada gerakan yang cukup sistematis bahwa bagi pencari kerja, selama mereka para imigran tidak mempunyai nama family Belanda dia jarang diterima sebagai karyawan. Mereka mendiskreditkan dengan misi Islamophobia melalui cara-cara semacam itu. Sebagaimana disampaikan oleh akademisi dari Universitas Amsterdams Muishout (Muishout, wawancara pribadi, 30 Juli 2023). Sementara itu Diaspora asal Banyumas yang sudah menetap selama 50 tahun menyatakan

Bahwa Islamophobia di Belanda muncul adanya diskriminasi pada saat imigran muslim mencari pekerjaan, namun demikian mereka para imigran ada yang tidak merasakan diskriminasi semacam itu (Danun, wawanacara personal, 14 Juli 2023).

Wawancara di atas memberikan informasi bahwa dalam konteks Belanda, Islamophobia muncul terutama dalam bentuk diskriminasi ketika imigran Muslim mencari

pekerjaan. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua imigran Muslim merasakan atau mengalami tingkat diskriminasi yang sama. Beberapa imigran mungkin tidak merasakan diskriminasi semacam itu. Wawancara ini menyoroti kompleksitas dan variasi dalam pengalaman imigran Muslim di Belanda, di mana beberapa individu mungkin lebih terpengaruh oleh diskriminasi dibandingkan dengan yang lain.

Danun, wawancara personal, 14 Juli 2023 juga menambahkan bahwa kalau ada partai politik yang mengembangkan phobia terhadap muslim, tidak mendapatkan dukungan. Bahkan pemerintah Belanda akan menaruh perhatian serius dan partai yang mendiskreditkan Islam akan dimarginalkan oleh pemerintah Belanda.

Ada indikasi bahwa pemerintah Belanda memiliki sikap yang tegas terkait dengan isu Islamophobia. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa partai politik yang mengembangkan atau mempromosikan Islamophobia tidak akan mendapatkan dukungan dari pemerintah Belanda. Bahkan, pemerintah Belanda berencana untuk memberikan perhatian serius terhadap isu ini, dan partai politik yang terlibat dalam diskreditasi terhadap Islam akan dimarginalkan. Dengan kata lain, pemerintah Belanda memiliki kebijakan yang berusaha untuk mencegah dan menghadapi Islamophobia dalam politik, dan mereka akan mengambil langkah-langkah untuk mengisolasi atau menghukum partai politik yang mempromosikan tindakan atau retorika anti-Muslim.

Pernyataan Danun, ini sejalan dengan apa yang dilansir Huyzer (Dutch News, 23 Juli 2023) yang melarang petugas polisi untuk bergabung dengan partai politik yang

dipilih secara demokratis tidak mungkin dan tidak diinginkan, tetapi lebih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan mereka menjalankan tugasnya dengan cara yang netral dan menghormati konstitusi. Salah satu laporan melibatkan seorang petugas di Den Haag yang dipulangkan setelah membuat 'komentar yang sangat tidak pantas' di media sosial. Petugas itu adalah anggota aktif partai PVV sayap kanan dan menjadi kandidat dalam pemilihan lokal tahun lalu.

Meskipun tidak mungkin dan tidak diinginkan untuk melarang petugas polisi untuk bergabung dengan partai politik yang dipilih secara demokratis, tetapi ada kebutuhan untuk memastikan bahwa petugas tersebut menjalankan tugasnya dengan cara yang netral dan menghormati konstitusi. Pernyataan ini mencerminkan dilema antara hak individu untuk berpartisipasi dalam proses politik demokratis dan kebutuhan untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum, seperti polisi, tetap netral dan tidak memihak dalam pelaksanaan tugas mereka. Contoh yang diberikan tentang petugas di Den Haag yang dipulangkan karena komentar yang tidak pantas di media sosial menunjukkan bahwa ketika seorang petugas polisi aktif dalam partai politik sayap kanan, ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang netralitas mereka dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa petugas polisi tetap netral dan tidak mempengaruhi penegakan hukum dengan pandangan politik mereka.

Lain halnya dengan apa yang dirasakan Zhara Di Belanda, terdapat dua istilah yang digunakan untuk menggambarkan masyarakat yang tinggal di sana, yaitu

"Allochtonen" dan "Autochtonen". Menurut pemahamannya, istilah "Allochtonen" merujuk kepada masyarakat minoritas dengan latar belakang imigran dari wilayah non-Barat, termasuk dalam kategori mereka yang memiliki keturunan dari negara seperti Maroko, Suriname, dan sebagainya. Sementara itu, istilah "Autochtonen" mengacu pada masyarakat yang kedua orang tua mereka dilahirkan dan dibesarkan di Belanda, serta mengadopsi budaya, gaya hidup, dan pola pikir yang umumnya dianut oleh orang Eropa/Barat.

Hasil survey National Survey on Working Conditions (NEA), terkait faktor diskriminasi imigran Allochtonen dan Autochtonen menjadi persoalan serius, 3,5 dari 10 merasa didiskriminasi, dan dari mereka yang berlatar belakang Suriname atau Belanda-Karibia, sekitar 3 dari 10. Dari orang-orang yang berasal dari Afrika dan Asia lainnya, 2,5 dari 10 menunjukkan hal ini. Kurang dari 1 dari 10 orang asal Belanda merasa didiskriminasi. Selain asal (etnis), kewarganegaraan, kewarganegaraan yang terdaftar di paspor atau dokumen identitas, juga diperiksa. Hampir 4 dari 10 penduduk berkebangsaan Maroko menyatakan bahwa mereka merasa didiskriminasi dalam 12 bulan terakhir, orang-orang yang berasal dari Afrika dan Asia lainnya, 2,5 dari 10 menunjukkan hal ini. Kurang dari 1 dari 10 orang asal Belanda merasa didiskriminasi. Selain asal (etnis), kewarganegaraan, kewarganegaraan yang terdaftar di paspor atau dokumen identitas, juga diperiksa. Hampir 4 dari 10 penduduk berkebangsaan Maroko menyatakan bahwa mereka merasa didiskriminasi dalam 12 bulan terakhir (lihat tabel yang dibuat khusus). 3,5 dari 10 orang China

mengatakan demikian, dan 3 dari 10 orang Brazil dan Indonesia.

Diskriminasi ini, menurut pengamatan peneliti awal mula munculnya benih para imigran enggan berbaur dengan warga Belanda, selain itu juga sebagian masyarakat Belanda, meyakini bahwa Islam sangat terkait dengan ajaran dan budaya teror dan bentuk kekerasan lainnya. Sebagian dari mereka melihat perjumpaan antara Islam dan budaya barat sebagai benturan peradaban dan agama (Fox, 2001). Bagi mereka yang mengusung Islamophobia, solusinya adalah melawan segala bentuk terorisme. Kemudian semakin tampak Islamophobia dampak dari munculnya beberapa imigran yang coba “mengelabui” negara melalui fasilitas rumah dan tunjangan keluarga yang diberikan oleh negara kepada imigran Muslim. Kepemilikan perumahan di Belanda mempunyai persoalan tersendiri, sulitnya membeli rumah dan sewa yang sangat tinggi menjadi persoalan bertahun-tahun, kebijakan pemerintah selama bertahun-tahun telah mendorong kepemilikan rumah dan menyerahkan bangunan ke pasar, menciptakan situasi di mana banyak orang kehilangan harga dan tidak dapat menemukan rumah yang terjangkau untuk dibeli, atau disewa. Lusinan orang berdemonstrasi minggu lalu di Den Haag dan mengajukan petisi dengan 102.621 tanda tangan menyerukan perumahan yang terjangkau kepada Hugo de Jonge, menteri perumahan.

Krisis perumahan sangat serius dan memburuk dalam beberapa tahun terakhir,” kata Dr Cody Hochstenbach, ahli geografi perkotaan di Universitas Amsterdam yang telah menulis buku tentang masalah tersebut (Capital Value, 17 Juni 2020). Wawancara peneliti dengan narasumber

“ada indikasi beberapa kasus imigran yang sudah berkeluarga sengaja cerai dengan pasangannya, sehingga masing-masing dari mereka mendapatkan fasilitas rumah dari negara. Padahal sejatinya mereka hanya cerai secara negara, tetapi tidak cerai secara agama mereka. Dan hal ini membuat warga Belanda yang di parlemen khususnya membuat aturan yang lebih ketat, dan stigma negatif pun muncul bahwa Islam dan semua imigran melakukan hal yang demikian, padahal yang melakukan hal demikian itu hanya segelintir orang. Kekurangan perumahan di Belanda lebih besar dari yang diperkirakan baru-baru ini dan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang” (Zhara, wawancara personal, 13 Juli 2023).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kasus cerai imigran mengindikasikan bahwa beberapa imigran yang sudah memiliki keluarga di Belanda sengaja bercerai dengan pasangan mereka agar dapat memperoleh fasilitas perumahan dari negara. Hal ini menunjukkan bahwa ada kekhawatiran terkait penyalahgunaan sistem fasilitas perumahan oleh sebagian kecil imigran. Praktik cerai ini, meskipun dilakukan oleh segelintir orang, telah memengaruhi persepsi negatif terhadap Islam dan imigran secara umum di kalangan warga Belanda, bahkan di parlemen. Hal ini menyebabkan pembuatan aturan yang lebih ketat terkait fasilitas perumahan bagi imigran. Ini mencerminkan bagaimana tindakan segelintir individu dapat memengaruhi pandangan dan kebijakan yang lebih luas terhadap kelompok yang lebih besar. Selain itu masalah kekurangan perumahan yang lebih besar di Belanda daripada

yang diperkirakan. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan perumahan di negara tersebut meningkat, dan ini dapat menjadi masalah serius di masa depan.

Dengan demikian tindakan segelintir individu dalam memanfaatkan sistem perumahan telah berdampak pada pandangan dan kebijakan terhadap imigran dan Islam secara lebih umum di Belanda. Selain itu, masalah kekurangan perumahan juga menjadi perhatian yang perlu diatasi oleh pemerintah.

Menurut perkiraan terbaru (Primos, 2020), kekurangan perumahan akan mencapai puncaknya sebanyak 415.000 rumah pada tahun 2024. Jumlah ini kira-kira 100.000 rumah lebih banyak daripada akhir tahun 2019 dan merupakan total 5,1% dari stok perumahan. Kekurangan perumahan saat ini diperkirakan sekitar 331.000 rumah seperti yang baru-baru ini diterbitkan dalam 'The State of the Housing Market' pemerintah Belanda. Ini kira-kira 15.000 rumah lebih banyak daripada perkiraan dari laporan penelitian Capital Value yang dirilis awal tahun ini. Meningkatnya kekurangan perumahan sebagian disebabkan oleh output rumah baru yang saat ini terlalu rendah. Selama empat bulan pertama tahun 2020, sekitar 19.000 izin bangunan telah dikeluarkan. Kekurangan perumahan dari 315.000 pada Februari menjadi 415.000 pada 2024.

Melalui framing media kelompok-kelompok yang mengkampanyekan Islamophobia di Belanda cenderung datang dari politisi sayap kanan dengan dukungan konstituennya. Institut Hak Asasi Manusia Belanda menggambarkan diskriminasi sebagai memperlakukan orang secara berbeda, merampas atau mengucilkan mereka atas dasar karakteristik (pribadi). Karakteristik ini disebut dasar

untuk diskriminasi. Diskriminasi atas alasan berikut tidak diizinkan oleh hukum. Perundang-undangan memberikan perlakuan yang sama melindungi. Salah seorang narasumber penelitian menjelaskan

Kelompok-kelompok tersebut akan muncul pada saat menjelang pemilu, artinya bahwa Islamophobia akan menjadi isu yang seksi (Noval, wawancara personal, 12 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kelompok Islamophobia di Belanda cenderung muncul atau aktif menjelang periode pemilihan umum (pemilu). Ini menunjukkan bahwa isu-isu terkait dengan Islam dan Islamophobia mungkin dimanfaatkan atau diperbincangkan secara intensif oleh beberapa pihak selama kampanye pemilu. Selain itu wawancara di atas juga memberikan informasi bahwa Islamophobia merupakan sebagai Isu Politik. Ini menyiratkan bahwa Islamophobia, yaitu ketakutan atau prasangka terhadap Islam atau Muslim, mungkin dianggap sebagai isu yang "seksi" atau menarik untuk dibahas dalam konteks politik. Hal ini bisa berarti bahwa isu ini dapat digunakan sebagai alat untuk menarik perhatian pemilih, memengaruhi pemilih, atau menciptakan perdebatan yang intens selama kampanye pemilu. Dengan kata lain, pernyataan tersebut menyiratkan bahwa Islamophobia mungkin menjadi salah satu isu yang memainkan peran penting dalam konteks politik menjelang pemilihan umum, dengan kelompok-kelompok tertentu yang berusaha memanfaatkannya atau mengangkatnya untuk kepentingan politik mereka.

Senada dengan Noval, Koen Damhuis menulis dalam salah satu media memberikan ulasan bahwa ketika Geert Wilders, pendiri dan pentolan Partai untuk Kebebasan (PVV), menjelaskan “Rencana untuk Belanda” menjelang pemilihan umum Belanda tahun 2017, dia menyatakan bahwa

“masalah terbesar di negara ini adalah Islamisasi”. Proses ini, kata Wilders, merupakan “ancaman eksistensial” terhadap “identitas kita, kebebasan kita. Menambahkan Koen Damhuis dalam media yang sama” setahu saya, PVV adalah satu-satunya partai politik di dunia yang hanya memiliki satu anggota resmi, Geert Wilders” (Koen Damhuis, 2023).

Dari wawancara di atas maka pandangan Wilders tentang Islamisasi sebagai masalah serius dan penting di Belanda, serta menunjukkan keunikan dalam struktur partai politik yang dipimpin. Islamisasi sebagai masalah terbesar: menunjukkan bahwa Geert Wilders, yang merupakan pemimpin Partai Kebebasan Belanda (PVV), menganggap perluasan pengaruh Islam dan praktik-praktik Islam sebagai isu yang sangat serius dan penting. Geert Wilders percaya bahwa Islamisasi merupakan masalah yang memengaruhi negara tersebut secara signifikan. Selain itu Wilders menyatakan bahwa Islamisasi merupakan "ancaman eksistensial" terhadap identitas dan kebebasan negaranya. Ini menggambarkan pandangan bahwa dia melihat pertumbuhan Islam atau pengaruh Islam sebagai ancaman terhadap budaya, nilai-nilai, dan kebebasan yang dia anggap penting dalam masyarakat Belanda.

Lebih lanjut Noval menambahkan bahkan

Kalau kita lihat dalam realitas kehidupan masyarakat khususnya bagi masyarakat muslim, baik dari Maroko, Turkey, maupun Indonesia baik-baik saja. Memang ada faktor kecemburuan dalam aspek ekonomi di masyarakat Belanda terhadap imigran. Mereka memandang masyarakat imigran dengan keluarga besar mereka, mendapatkan fasilitas negara, sedangkan masyarakat Belanda yang cenderung dengan keluarga kecil bahkan terkadang mereka hidup sendiri (Noval, wawancara personal, 12 Juli 2023)

Hasil wawancara diatas memberikan informasi bahwa dalam realitas kehidupan masyarakat di Belanda, terutama bagi masyarakat muslim dari berbagai negara seperti Maroko, Turki, dan Indonesia, situasinya sebagian besar baik-baik saja. Namun, ada faktor kecemburuan dalam aspek ekonomi di kalangan masyarakat Belanda terhadap imigran. Masyarakat Belanda melihat bahwa imigran, terutama yang datang dengan keluarga besar, dapat menerima berbagai fasilitas dari negara, sedangkan masyarakat Belanda cenderung hidup dengan keluarga kecil atau bahkan sendiri. Dengan demikian persepsi kecemburuan ekonomi yang dapat muncul di kalangan masyarakat Belanda terhadap imigran, terutama ketika imigran dilihat sebagai penerima manfaat yang lebih besar dari sistem sosial. Ini adalah masalah sensitif yang memengaruhi hubungan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat Belanda dan dapat memengaruhi opini dan pandangan tentang imigrasi dan kebijakan sosial.

Lebih dari 1 dari 10 orang Belanda (11 persen) berusia 15 tahun ke atas akan mengatakan pada tahun 2021 bahwa mereka merasa didiskriminasi dalam 12 bulan terakhir. Itu lebih dari 1,6 juta orang (Math Akkermans, Riann Kloosterman Publicatiedatum :4-7-2022 00:00, Centraal Bureau Voor de Statistiek) mendapatkan fasilitas negara sesuai dengan jumlah anggota keluarga. Bahkan pendatang asing mendapatkan fasilitas perumahan yang besar dibanding orang Belanda sendiri (Noval, wawancara personal, 12 Juli 2023),

Narasumber lain yang merupakan diaspora yang sudah menetap lama di Amsterdams turut menyetujui bahwa persoalan perkembangan Islamophobia di Belanda seringkali digeneralisasikan bahwa yang berdampak adalah Islam keseluruhan di Belanda.

Kasus itu, sudah dilakukan upaya diplomasi dan komunikasi dengan pemerintah Belanda melalui organisasi-organisasi keislaman yang ada (baca Diaspora) dan pemerintah Belanda mengerti apa yang sesungguhnya terjadi, tetapi lagi-lagi framing media yang dilakukan oleh partai buruh yang merupakan partai sayap kanan, menjadikan isu anti Islam semakin ramai untuk kepentingan politiknya (wawancara personal, Ali Muhammad Ali, 17 Juli 2023)

Berdasarkan wawancara di atas maka upaya diplomasi dan komunikasi telah dilakukan dengan pemerintah Belanda melalui organisasi-organisasi Islam, yang mencakup diaspora Muslim di Belanda. Pemerintah Belanda telah memahami situasi yang sebenarnya terjadi dalam kasus tersebut. Namun, isu anti-Islam telah menjadi

perdebatan yang semakin meningkat dalam masyarakat, terutama karena framing media yang dilakukan oleh partai buruh yang merupakan partai sayap kanan. Partai ini mungkin menggunakan isu ini untuk kepentingan politiknya. Dengan demikian meskipun ada upaya diplomasi dan pemahaman dari pemerintah Belanda terkait kasus tersebut, isu anti-Islam tetap menjadi masalah yang kompleks dan politis, dengan media dan partai politik tertentu terlibat dalam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu tersebut.

B. Strategi Adaptasi Diaspora Muslim Indonesia dalam Menanggapi Anti Islam di Belanda

Secara umum, kelompok imigran dari negara-negara Islam, terutama kelompok muslim, yang telah memilih untuk menetap di Belanda telah membentuk diaspora. Banyak dari mereka telah berkontribusi dalam membangun infrastruktur Islam di Belanda, dengan lebih dari 430 masjid yang telah didirikan. Panggilan adzan yang terdengar di Belanda juga bukanlah hal yang asing bagi penduduk setempat. Bahkan, kehadiran banyak pelajar dari negara-negara muslim telah memberikan nuansa dan keragaman tersendiri. Saat ini, terdapat ratusan organisasi Islam di Belanda, baik dalam skala besar maupun kecil, yang telah menjadi bagian dari lanskap keagamaan di negara tersebut.

Organisasi yang mereka dirikan memiliki fungsi yang beraneka macam, mulai untuk pelestarian budaya sampai sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai kaum minoritas di Belanda. Pemerintah Belanda sendiri sebenarnya terbuka terhadap pendirian organisasi-

organisasi Islam ini dengan tujuan agar tercapai akselerasi proses integrasi bangsa di Belanda.

Adanya organisasi-organisasi Islam tersebut, diaspora muslim di Belanda memiliki wadah yang dapat mengatur mereka. Keberadaan masjid merupakan simbol tempat untuk berinteraksi untuk mempererat ukhuwah umat muslim dan melaksanakan kajian-kajian Islam. Selain itu, fenomena ini juga menyebabkan munculnya berbagai macam organisasi yang berfokus pada berbagai bidang seperti pendidikan, kehidupan sosial, dan amal (Wawancara dengan pengurus KBRI di Belanda, 2023).

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa di Belanda, keberadaan organisasi-organisasi Islam memberikan wadah bagi diaspora Muslim untuk berinteraksi dan menjalin ikatan ukhuwah (solidaritas) dalam komunitas Muslim. Ini menunjukkan pentingnya organisasi-organisasi tersebut dalam membantu menghubungkan anggota diaspora Muslim di lingkungan yang mungkin berbeda budaya dan sosial. Selaian itu Masjid memiliki peran penting dalam memfasilitasi interaksi sosial dan pemahaman agama. Masjid dianggap sebagai tempat untuk menjalankan kajian-kajian Islam dan mempererat komunitas Muslim, yang menunjukkan bahwa masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat aktivitas sosial dan keagamaan. Munculnya menyebabkan munculnya berbagai macam organisasi yang berfokus pada berbagai bidang seperti pendidikan, kehidupan sosial, dan amal. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas Muslim di Belanda aktif terlibat dalam berbagai

kegiatan sosial, budaya, dan pendidikan yang bertujuan untuk mendukung anggota komunitas dan mempromosikan nilai-nilai agama.

Munculnya organisasi-organisasi keagamaan ini terjadi sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat muslim, seperti tempat ibadah, pemakaman, dan pelaksanaan kurban. Kondisi ini membuktikan jika pemerintah Belanda cukup terbuka terhadap pendirian organisasi-organisasi Islam.

Proses integrasi kaum imigran muslim tidak berjalan seperti yang diharapkan pemerintah Belanda, karena rata-rata dari mereka lebih memilih untuk menikah dengan sesama bahkan mendatangkan langsung pasangannya dari negara asal, bahkan kecenderungan dari mereka enggan membuat ikatan keluarga dengan warga asli Belanda. Persoalan ini lambat laun menjadi persoalan tersendiri. Bahkan berdasarkan pengamatan peneliti selama di Belanda, nyaris tidak menemukan komunitas berbaurnya imigran muslim dengan warga asli Belanda. Mereka lebih menikmati dengan komunitasnya sendiri. Narasumber penelitian menyatakan bahwa

Bahkan di sebuah perumahan, kalau ada salah satu warga perumahan dihuni oleh imigran khususnya imigran dari Maroko, maka warga asli Belanda memilih untuk pindah di perumahan lain (Noval, Wawancara Personal, 12 Juli 2023).

Wawancara di atas memberikan informasi bahwa terdapat ketidaknyamanan atau ketidakpuasan di kalangan warga asli Belanda terkait dengan kehadiran imigran,

khususnya imigran dari Maroko, di perumahan mereka. Ketika ada salah satu warga perumahan yang dihuni oleh imigran, warga asli Belanda memilih untuk pindah ke perumahan lain. Hasil wawancara di atas menunjukkan bagaimana kehadiran imigran dapat memengaruhi dinamika sosial di beberapa lingkungan di Belanda, dan bagaimana ada ketidakseimbangan atau ketegangan antara kelompok-kelompok tersebut. Ini juga mencerminkan perasaan ketidaknyamanan atau ketidakpuasan di kalangan warga asli Belanda terhadap imigran, yang dapat mengakibatkan pemisahan antara kelompok-kelompok tersebut.

Tidak berjalannya proses integrasi di Belanda tidak hanya diakibatkan oleh pandangan yang tidak bisa menerima kebudayaan dan gaya hidup masyarakat Belanda. Huntington juga mengemukakan pandangan bahwa konflik yang muncul akibat benturan antara dua peradaban disebabkan oleh karakteristik dan ketidakmampuan budaya yang berbeda untuk berintegrasi, atau dalam konteks konflik di Belanda, perbedaan antara kebudayaan Islam dan paham liberalisme yang dipegang oleh negara Belanda yang berlawanan.

Akibat dari gagalnya proses integrasi inilah yang mempengaruhi mereka untuk memandang Islam dan Muslim dengan kecurigaan dan kecemasan secara berlebihan. Maka di sinilah awal isu anti Islam dilancarkan oleh sebagian politisi Belanda dengan menggunakan framing media yang diyakini akan menyebar secara cepat dan bagi yang menyebarkan akan populer di tengah isu-isu politik yang memanas. Atau dapat diartikan bahwa perkembangan Islamophobia di Belanda selalu mengalami pasang surut tergantung situasi. Terkadang menguat di tengah situasi politik. Surat kabar Daily Sabah (23/07/22), membuat

laporan bahwa pengaduan diskriminasi yang diajukan ke polisi terus meningkat selama tiga tahun berturut-turut. Hampir 43% dari semua pengaduan diskriminasi yang diterima oleh polisi dan 49% pengaduan yang ditangani oleh Layanan Pengaduan Diskriminasi (ADV) adalah kasus berdasarkan etnis.

Menurut laporan Daily Sabah tersebut, juga terungkap bahwa diskriminasi berbasis etnis dan ras sebagian besar dialami dalam pengaturan profesional dan layanan publik. Mengutip data polisi tentang diskriminasi agama, laporan tersebut mengidentifikasi umat Islam sebagai korban utama, menjadi sasaran dalam 93% kasus pada tahun 2022, dibandingkan dengan 67% pada tahun sebelumnya. Demikian pula, angka ADV menunjukkan bahwa Muslim menjadi target di lebih dari 73% kasus diskriminasi agama pada tahun 2022. Angka ini mencapai 65% pada tahun 2021. Padahal sejak 2019, Belanda mengeluarkan serangkaian undang-undang yang meningkatkan diskriminasi terhadap Muslim dan pelanggaran hak-hak mereka, menurut akademisi Belanda. Dalam pengamatan salah satu sumber, munculnya Islamophobia di Belanda lebih disebabkan oleh faktor media yang sengaja memback up isu seputar terorisme, yang pelakunya adalah umat Islam dan berasal dari negara-negara Islam.

Framing media tersebut mengarah pada umat Islam tanpa kecuali diaspora muslim Indonesia. Dengan demikian organisasi keagamaan memiliki peran penting dalam menangkan framing media.

Untuk itu strategi yang dilakukan oleh diaspora muslim Indonesia melalui organisasi keagamaan

yang ada, keberadaannya diharapkan dapat mengurangi stigma negatif bahwa Islam adalah agama kekerasan yang identik dengan terorisme (Nur Hasyim, wawancara personal, 11 Juli 2023).

Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa diaspora muslim Indonesia di Belanda telah mengadopsi strategi melalui organisasi keagamaan yang ada untuk mengurangi stigma negatif terhadap Islam. Tujuan dari strategi ini adalah untuk meredakan persepsi bahwa Islam identik dengan kekerasan dan terorisme. Dengan melalui kegiatan-kegiatan dan komunikasi yang dilakukan melalui organisasi keagamaan, diaspora muslim Indonesia berupaya mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang Islam sebagai agama yang moderat dan perdamaian. Dalam konteks ini, organisasi keagamaan dapat berperan sebagai jembatan antara komunitas muslim dan masyarakat umum di Belanda. Mereka dapat menyediakan platform untuk dialog, edukasi, dan pemahaman yang lebih baik antara anggota komunitas muslim dan masyarakat Belanda, dengan harapan bahwa hal ini dapat membantu mengurangi stigma dan prasangka negatif terhadap Islam di Belanda.

James B. Hoesterey (2020) mengatakan, bahwa kegiatan positif tersebut merupakan bagian dari diplomasi yang sangat berpengaruh dalam meredakan ketegangan gerakan Islamophobia di Barat. Strategi adaptasi yang dilaksanakan oleh diaspora muslim Indonesia dalam menangkal gerakan Islamophobia di Belanda merupakan bagian dari diplomasi multijalur (*Multy Track Diplomacy*) yang dikembangkan dan dipraktikkan oleh John W. McDonald dan Louise Diamond (McDonald, 2012). Namun demikian

dalam penelitian ini, penggunaan multi jalurnya James B Hoesterey hanya digunakan *track* yang dianggap relevan untuk penyelesaian strategi adaptasi diaspora muslim Indonesia dalam meminimalisir Islamophobia. Yaitu jalur pertama aktor negara, jalur kedua aktor non-negara, jalur ke empat warga negara, jalur ke lima yaitu institusi pendidikan serta jalur ke enam dan ke tujuh yaitu aktivis dan institusi keagamaan.

Jalur 1 : Berdasarkan teori ini, merupakan diplomasi yang dilakukan oleh negara yang dikenal dengan diplomasi resmi oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI di beberapa negara. Jalur ini menjadikan proses adaptasi terhadap instrumen kebijakan pembuat regulasi perdamaian, menurut Mc Donald (2012) diselenggarakan untuk menjamin hubungan bilateral dan multilateral antar negara. Jalur ini oleh peneliti disebut strategi adaptasi yang dilaksanakan oleh institusi negara dalam rangka upaya memberikan narasi resmi agar tercipta harmonisasi agar tercipta perdamaian.

Jalur 2: Di jalur ini kekuatan non-negara yaitu organisasi keagamaan dan organisasi sosial lainnya berfungsi melibatkan aktor dan organisasi non-pemerintah dan profesional untuk menyebarkan narasi positif Islamophobia. Di jalur ini, aktor non-negara profesional mencoba menganalisis, mencegah, menyelesaikan, dan mengelola konflik internasional (McDonald, 2012). Jalur ini merupakan strategi adaptasi yang dilaksanakan oleh institusi non negara, yaitu peran organisasi keagamaan dan sosial dalam rangka upaya memberikan narasi positif agar tidak tercipta stigma negatif, karena jalur ini sangat rentan sebagai korban terhadap Islamophobia di suatu wilayah.

Peran mereka (diaspora Muslim asal Indonesia) memiliki signifikansi besar dalam upaya diplomasi lunak Indonesia di satu sisi dan memiliki dampak yang lebih luas, yaitu mendorong dialog sosial dan kemanusiaan antarnegara di sisi lain. Di tengah gejala radikalisme agama dan meningkatnya Islamofobia baru-baru ini, buku ini bertujuan untuk menyajikan alternatif narasi guna mempromosikan interaksi global yang lebih baik (Wawancara dengan Munawir Aziz, Sekretaris PCI Nahdlatul Ulama United Kingdom, 2023).

Diaspora Muslim asal Indonesia memiliki peran penting dalam upaya diplomasi lunak Indonesia. Mereka dapat berfungsi sebagai agen-agen yang mempromosikan citra positif Indonesia dan Islam moderat di dunia internasional. Ini mencerminkan bagaimana pemerintah Indonesia memanfaatkan diaspora untuk memperkuat hubungan diplomatik dan mempromosikan citra positif negara.

Diaspora Muslim asal Indonesia juga telah mendorong Dialog Sosial dan Kemanusiaan. Peran ini memiliki dampak yang lebih luas, yaitu mendorong dialog sosial dan kemanusiaan antarnegara. Dalam konteks meningkatnya gejala radikalisme agama dan Islamophobia, diaspora Muslim asal Indonesia dapat berperan dalam mempromosikan dialog, pemahaman lintas budaya, dan perdamaian di tingkat global. Mereka dapat membantu meredakan ketegangan dan menciptakan jembatan antara berbagai kelompok masyarakat.

Organisasi keagamaan dan organisasi sosial lainnya berfungsi melibatkan aktor dan organisasi non-pemerintah dan profesional untuk menyebarkan narasi positif Islamophobia. Salah satunya adalah dengan upaya penyebaran nilai-nilai Islam moderat terus digalakkan oleh PCINU Belanda.

PCINU Belanda berusaha menyebarkan gagasan moderasi beragama dengan berbagai program termasuk dilaksanakannya konferensi internasional dua tahunan bekerja sama dengan universitas-universitas terkemuka di Belanda. Kegiatan ini bertujuan untuk untuk menampilkan wajah Islam moderat, damai dan toleran di Belanda dan benua Eropa (Anshori, 2023).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa PCINU Belanda memiliki upaya aktif dalam menyebarkan gagasan moderasi beragama. Mereka melakukan ini melalui berbagai program, termasuk penyelenggaraan konferensi internasional dua tahunan yang bekerja sama dengan universitas-universitas terkemuka di Belanda. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menampilkan Islam yang moderat, damai, dan toleran di Belanda dan benua Eropa. Wawancara tersebut juga menunjukkan komitmen PCINU Belanda dalam mempromosikan pemahaman positif tentang Islam yang sejalan dengan nilai-nilai moderasi, kedamaian, dan toleransi. Melalui konferensi internasional dan program lainnya, mereka berupaya membentuk citra yang positif tentang Islam di lingkungan di mana mereka berada, dengan harapan bahwa ini akan berdampak positif pada pemahaman dan hubungan antarbudaya.

Selanjutnya, disebut diplomasi Jalur 4, yakni mempekerjakan keterlibatan pribadi warga negara (McDonald, 2012). Dalam hal ini, organisasi keagamaan memiliki peran yang signifikan dalam menyebarkan narasi positif Islam Nusantara untuk melawan Islamophobia di Belanda, karena mereka telah bersentuhan langsung dengan masyarakat Belanda. Strategi Adaptasi yang dilaksanakan di jalur ini adalah memberikan upaya komunikasi yang baik untuk menjelaskan pemahaman terhadap warga negara, agar keterlibatan pribadi warga negara tersebut tidak berlebihan memberikaan stigma negatif dan atau memberikan reaksi yang berlebihan.

Track 5, yaitu jalur diplomasi yang diselenggarakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Belanda menjadi duta diplomasi bidang pendidikan. Strategi adaptasi di jalur ini sangat penting, di mana para mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di negara Belanda karena sebagian besar mahasiswa di Belanda. Dalam konteks ini, program yang diselenggarakan oleh mahasiswa Indonesiaa di Belanda dengan melaksanakan penelitian, pertukaran ide (forum diskusi yang diselenggarakan rutin di masjid-masjid yang ada di Belanda) telah mendapatkan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan program 5000 Doktor dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Sedangkan Track 6 adalah diplomasi yang ditempuh melalui advokasi oleh para aktivis. Dalam jalur ini, organisasi keagamaan secara aktif membangun dialog antar umat beragama yang ada. Strategi adaptasi yang dilaksanakan dengan cara melaksanakan komunikasi dua arah antar umat

beragama lainnya yang ada di Belanda, yaitu agama yang berkembang di Belanda.

Jalur 7 diplomasi melibatkan komunitas agama. Dalam hal ini, diaspora Muslim Indonesia menggunakannya untuk menyebarkan Islam Nusantara yang damai bekerjasama dengan *European Council for Fatwa and Research* untuk ikut menentukan fatwa (sudut pandang) di Eropa. Strategi adaptasi ini menghasilkan rekomendasi terhadap pihak yang berwenang, yang dapat memberikan masukan kepada parlemen. Agar regulasi yang diputuskan lebih membawa keberkahan bagi semuanya dan dapat memberikan perlindungan semua warga negara tanpa membedakan suku, ras dan agama.

Track 9 mencakup diplomasi yang dilakukan melalui penyebaran informasi dan komunikasi. Menurut Diamond dan McDonald, peran utama teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk menyebarkan pengetahuan tentang perdamaian, penyelesaian konflik, dan hubungan internasional kepada masyarakat umum (McDonald, 2012: 68). Dalam strategi adaptasi ini, organisasi keagamaan perlu bekerjasama dengan jalur pertama, yaitu Kementerian Luar Negeri.

Berdasarkan *multy track diplomacy* inilah, bahwa track pertama dan kedua yang dilakukan oleh organisasi keagamaan dalam hal ini PCINU (jalur kedua) dalam merespon Islamophobia merupakan bagian dari strategi adaptasi yang dilakukan oleh diaspora muslim Indonesia melalui organisasi PCINU ini telah bekerjasama dengan KBRI dan Kementerian Agama RI (jalur pertama), bekerjasama dengan universitas, *European Council for Fatwa & Research*, dan berbagai komunitas di Belanda untuk

melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya adalah konferensi dua tahunan, seminar, dalam rangka memberikan solusi atas Islamophobia yang terjadi di Belanda.

Organisasi ini juga menjalin dialog antar umat beragama dan telah tergabung dalam Netherlands-Indonesia Consortium for Muslim-Christian Relations (NICMCR), di forum inilah, Islam diperkenalkan secara utuh (Nur Hasyim, wawancara personal, 11 Juli 2023).

Dapat diketahui bahwa organisasi keislaman atau organisasi serupa, telah aktif dalam menjalin dialog antar umat beragama. Mereka juga telah menjadi bagian dari *Netherlands-Indonesia Consortium for Muslim-Christian Relations* (NICMCR), di mana Islam diperkenalkan secara lebih menyeluruh atau lengkap. Wawancara di atas menunjukkan bahwa organisasi keislaman telah berperan dalam mempromosikan dialog dan pemahaman antara komunitas Muslim dan Kristen. Keanggotaan mereka dalam konsorsium tersebut menekankan pentingnya memperkenalkan Islam secara lebih komprehensif dan mendalam dalam upaya menciptakan dialog antarumat beragama yang lebih baik.

Agenda kegiatan lain yang dilakukan oleh Diaspora Muslim Indonesia untuk melawan narasi Islamophobia di Barat, yaitu dengan menyelenggaraan Konferensi Internasional Dua Tahunan.

Kegiatan konferensi pertama dilaksanakan kerja sama dengan Vrije Universiteit Amsterdam pada tahun 2017 dengan tema “Rethinking Indonesia's Islam Nusantara: From Local Relevance to Global

Significance”. Yang kedua diselenggarakan tahun 2019 dan kerja sama dengan Radboud University, dengan tema “Mencari Jalan Tengah (Al Wasatiyyah): Artikulasi Islam Moderat” (Afnan Anshori, wawancara personal ketua PCINU Belanda, 16 Juli 2023).

Hasil wawancara diatas menegaskan bahwa PCINU Belanda telah menyelenggarakan dua konferensi internasional dengan kerja sama universitas-universitas terkemuka di Belanda. Konferensi pertama berlangsung pada tahun 2017 bekerja sama dengan Vrije Universiteit Amsterdam dengan tema "Rethinking Indonesia's Islam Nusantara: From Local Relevance to Global Significance" (Mengkaji Ulang Islam Nusantara Indonesia: Dari Relevansi Lokal ke Signifikansi Global). Konferensi kedua diadakan pada tahun 2019 dengan kerja sama Radboud University dengan tema "Mencari Jalan Tengah (Al Wasatiyyah): Artikulasi Islam Moderat."

Hasil wawancara ini menegaskan bahwa PCINU Belanda telah memfasilitasi konferensi internasional dengan fokus pada pemahaman dan promosi Islam moderat serta isu-isu terkait dengan Islam di Indonesia dan secara global. Melalui konferensi-konferensi ini, mereka berusaha untuk mendiskusikan, mengkaji ulang, dan memperluas pemahaman tentang Islam moderat dan dampaknya di tingkat lokal dan global.

Seperti yang dikatakan McDonald, tidak ada jalur tunggal yang dapat diterapkan secara lengkap dan mandiri untuk mencapai kesuksesan. Dibutuhkan ikhtiyar bersama dengan menggunakan berbagai jalur diplomasi (McDonald, 2012). Setiap jalur diplomasi memiliki kekuatan dan

kelemahan. Untuk itu perlu adanya strategi adaptasi bagi aktor-aktor pelaku di setiap jalur sesuai dengan situasi dan karakteristik isu yang dihadapinya.

Institusi resmi negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat diaspora muslim Indonesia. Kehadiran institusi resmi negara adalah untuk mengembangkan dialog kepada warga diaspora muslim terhadap Islamophobia yang dialami langsung di masyarakat baik persoalan diskriminasi ekonomi, sosial, sehingga dengan demikian persoalan akar rumput bisa disampaikan melalui jalur diplomasi resmi negara. Dengan begitu kelemahan di jalur ini bisa dioptimalkan oleh institusi negara.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai ormas Islam terbesar di dunia memiliki peran yang sangat strategis dalam menyebarkan faham dan praktik moderasi beragama ke dunia sebagai manifestasi dari paham Islam *rahmatan li al-'ālamīn* (Islam adalah berkah bagi alam semesta), mencari solusi konflik di Timur Tengah; memerangi ekstremisme; dan Islamophobia di Barat (Maimun & Kosim, 2019; Taufiq, 2020b: 59). NU dapat berperan ganda dalam diplomasi bersinergi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama RI melalui jaringan Nahdlatul Ulama di seluruh dunia, termasuk Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) di Belanda (Siddik, 2016). Dalam hal ini NU menawarkan konsep Islam Nusantara sebagai Inspirasi peradaban dunia (Maimun, 2017: 392; Nurhisam & Huda, 2016: 152). Strategi adaptasi yang dilakukan oleh ormas Islam ini diharapkan dapat mengurangi stigma bahwa Islam adalah agama kekerasan yang identik dengan terorisme.

Hasil dari studi tersebut mengindikasikan bahwa diaspora Muslim Indonesia, sebagai warga asli, menerapkan

strategi adaptasi di tengah kelompok diaspora Muslim dengan budaya Barat, menghasilkan tiga bentuk identitas yang memerlukan upaya keras dan pemikiran yang mendalam, yaitu Muslim dengan pandangan liberal, moderat, dan radikal. Tulisan oleh Gemilang dan Windayanto (2020) menghadirkan pandangan baru, mengingatkan bahwa diaspora Muslim sebenarnya bukanlah kelompok homogen seperti yang sering dijelaskan oleh kalangan sayap kanan di Eropa. Sebaliknya, mereka adalah kelompok yang beragam dalam komposisinya. Siregar (2009) juga menyoroti pentingnya ikatan dengan tanah air asal dalam konteks studi tentang diaspora. Hubungan ini bisa berwujud sebagai simbol, emosi, dan juga dalam bentuk materi, yang menghubungkan anggota komunitas diaspora dan membedakan mereka dari penduduk setempat. Konsep asal-usul negara juga memunculkan isu mengenai loyalitas ganda.

Setidaknya terdapat rencana adaptasi di dalamnya. Pertama, pelaku mengembangkan kepercayaan dalam kerangka norma-norma sosial tertentu (seperti norma moral dan penghargaan) melalui hubungan yang berkelanjutan. Kedua, pelaku memanfaatkan norma yang sudah ada sebelumnya yang memfasilitasi adaptasi tersebut. Sebagai contoh, Pierre Bourdieu mengartikan modal sosial sebagai agregat sumber daya aktual atau potensial yang terhubung dengan potensi memiliki hubungan saling percaya di antara anggota dan pengakuan di antara mereka, yang memiliki dimensi yang berkelanjutan (Castiglione dkk, 2008, hlm. 4).

Konsepsi diaspora yang dilakukan oleh PCINU Belanda dengan usaha mempertahankan narasi keagamaan Islam tradisional beraliran ahli *sunnah wal jamaah an-nabdliyyah* di perantauan sesuatu yang mereka fahami dari tanah asal,

sehingga membentuk koneksi keagamaan Islam tradisional global di tengah pertarungan identitas yang semakin keras (Gusnelly et al., 2021). Oleh karena itu, baik pemerintah Indonesia maupun Belanda menganggap praktik-praktik keagamaan yang diterapkan dan dipromosikan oleh PCINU sebagai contoh yang baik untuk membangun masyarakat yang beragam.

Melalui KBRI di Den Haag, Pemerintah Indonesia secara aktif mendukung kegiatan-kegiatan para Diaspora Muslim Indonesia. Pemerintah Belanda juga memiliki sikap yang serupa. Dalam hal operasional lebih konkret, Pemerintahan Kotapraja Moerwijk telah beberapa kali mengundang pengurus Masjid Al-Hikmah untuk berpartisipasi dalam festival multikultural lokal. Hal ini dilakukan karena mereka menghargai pendekatan pembinaan agama ala NU yang membawa semangat baru di tengah meningkatnya sentimen konservatif dalam agama di satu sisi, dan fenomena Islamofobia di sisi lain.

Dalam kaitan ini, Gusnelly, et al., (2021) berkesimpulan, bahwa pengalaman PCINU Belanda merupakan lahan subur untuk studi-studi diaspora, khususnya dari sisi keagamaan. Sesungguhnya, hal ini bukanlah sesuatu yang baru. Azyumardi Azra (1994) juga menunjukkan peranan penting ulama Indonesia dalam membangun jembatan konektivitas keagamaan global pada abad ke-17 dan ke-18. Karena itu, jika Kementerian Agama RI, terus menggaungkan visi dan misi membangun moderasi beragama, tentu adalah merupakan bagian proyek besar membangun visi keberagaman yang moderat di ranah global, demi terwujudnya Islam yang rahmatan lil alamin, dalam dunia nyata yang sesungguhnya.

Diaspora Muslim Indonesia di Belanda telah berusaha mempertahankan narasi keagamaan Islam tradisional beraliran ahli *sunnah wal jamaah an-nahdliyyah* di perantauan sesuatu yang mereka fahami dari tanah asal, sehingga membentuk koneksi keagamaan Islam tradisional global di tengah pertarungan identitas yang semakin keras (Gusnelly et al., 2021). Dengan demikian diaspora Muslim Indonesia di Belanda telah mampu memanfaatkan ruang publik sebagai arena diskusi. Hal inilah yang disebut oleh Habermas bahwa ruang publik sebagai tempat di mana individu dari berbagai latar belakang dapat bertemu dan berbicara secara bebas (Arditama, 2016). Ini mencakup berbicara tentang masalah-masalah publik, termasuk yang terkait dengan agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai sebuah negara demokrasi, pemerintah Belanda telah melakukan upaya untuk mencegah rasisme yang diakibatkan oleh karena Islamophobia. Penegakan hukum ditempuh dengan cukup tegas. Subadi menuturkan, “Untung penegakan hukum di Belanda kuat, sehingga pelaku ditangkap dan diberi denda atau hukuman” (Subadi, 25 Juli 2020). Terbukti pada tahun 2016 Geert Wilders, seorang politikus anti-Islam sayap kanan, dibawa ke pengadilan atas tuduhan penghasutan dan diskriminasi melalui pidato di media” (Nursalikah, 2016). Kelompok yang mengkampanyekan Islamofobia di Belanda cenderung datang dari politisi sayap kanan dengan dukungan konstituennya. Mereka terang-terangan melontarkan pernyataan dan provokasi anti-Islam dengan berbagai cara, yang selalu ditanggapi oleh umat Islam. Di antara tindakan ofensif tersebut adalah penerbitan karikatur Nabi Muhammad; pelarangan simbol Islam seperti masjid,

pesantren, dan hijab di tempat umum; pelarangan para pendatang Muslim dari negara-negara Islam yang telah bekerja di banyak distrik di Belanda; dan gagasan diskriminatif lainnya (Subadi, 25 Juli 2020).

Dengan demikian diaspora Muslim Indonesia di Belanda telah menyadari bahwa wacana kelompok yang mengkampanyekan Islamofobia adalah untuk keperluan kekuasaan. Hal ini sejalan dengan *Foucault* bahwa wacana digunakan sebagai alat kekuasaan. Dalam analisis wacana Foucault, mencari tahu bagaimana wacana digunakan untuk mengendalikan, mengarahkan, atau mengubah perilaku dan pemikiran individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu dialog dan diskusi yang dilakukan oleh diaspora Muslim Indonesia di Belanda dalam rangka mencegah wacana-wacana Islamophobia yang digunakan sebagai alat kekuasaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Islamophobia di Belanda, mengalami pasang surut sesuai perkembangan politik dan isu-isu aktual imigran yang terjadi di Belanda. Isu Islamophobia akan terus mengelinding dan mengalami eskalasinya ketika menjelang pemilu. Partai-partai politik sayap kanan yang di motori oleh tokoh politik sayap kanan Greet Wilders melalui framing media terus mendiskreditkan Islam secara keseluruhan baik soal perolehan fasilitas negara bagi kaum imigran sampai pada rekrutmen karyawan yang tidak punya nama family Belanda. Di sisi lain banyaknya kaum imigran yang juga aktif di pergolakan politik khususnya imigran Maroko. Ada beberapa corak kehidupan kaum imigran berdasarkan pengamatan peneliti, Imigran Turki lebih cenderung dengan kehidupan bisnisnya, sepanjang bisnis mereka tidak terganggu oleh situasi Islamophobia mereka tidak melakukan perlawanan. Sedangkan untuk Imigran Maroko, corak kehidupannya akan mengikuti setiap isu dan pergolakan politik yang terjadi di negara kincir angin, sehingga dari mereka akan memperjuangkan

haknya melalui jalur-jalur politik. Sedangkan khusus imigran dari Indonesia, mereka lebih nyaman melakukan upaya diplomatik untuk menyelesaikan persoalan yang muncul.

2. Strategi adaptasi yang dilaksanakan oleh diaspora muslim Indonesia dalam meminimalisir Islamophobia di Belanda merupakan bagian dari *Multy Track Diplomacy*. Jalur tersebut diantaranya adalah *Track Two*, yaitu melalui jalur kekuatan non-negara. Dalam merespon Islamophobia merupakan bagian dari strategi adaptasi yang dilakukan oleh diaspora muslim Indonesia melalui organisasi PCINU ini telah bekerjasama dengan KBRI dan Kementerian Agama RI (jalur pertama), bekerjasama dengan universitas, *European Council for Fatwa & Research*, dan berbagai komunitas di Belanda untuk melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya adalah konferensi dua tahunan, seminar, dalam rangka memberikan solusi atas Islamophobia yang terjadi di Belanda. Organisasi ini juga menjalin dialog antar umat beragama dan telah tergabung dalam *Netherlands-Indonesia Consortium for Muslim-Christian Relations* (NICMCR), di forum inilah menurut Nur Hasyim, Islam diperkenalkan secara utuh. Selain itu diaspora Indonesia juga melakukan *Multy Track Diplomacy* melalui *Track Seven* yaitu diplomasi melibatkan komunitas

agama. Dalam hal ini, diaspora Muslim Indonesia menggunakannya untuk menyebarkan Islam Nusantara yang damai bekerjasama dengan *European Council for Fatwa and Research* untuk ikut menentukan fatwa (sudut pandang) di Eropa. Strategi adaptasi ini menghasilkan rekomendasi terhadap pihak yang berwenang, yang dapat memberikan masukan kepada parlemen.

B. Saran

1. Diaspora selaku lembaga resmi pemerintah senantiasa melakukan komunikasi dengan para imigran dan mensosialisasikan program transnasional, sehingga kesadaran imigran terhadap kultur budaya masyarakat negara penerima bisa di pahami dan mengerti serta identitas negara asal bisa berakulturasi.
2. Diaspora muslim Indonesia jumlahnya masih sedikit di banding diaaspora dari negara lain, sehingga keterlibatan peran kurang di dengar oleh para pihak, walaupun peran *multy track diplomacy* yang sesungguhnya sudah berbagai jalur ditempuh

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelkader, E. (2017). Comparative Analysis of European Islamophobia: France, England, Germany, the Netherlands, and Sweden. *UCLA Journal of Islamic Law and the Near East*, 16. <https://doi.org/10.5070/N4161038735>
- Al-Ansi, A., Chua, B. L., Kim, C. S., Yoon, H., & Han, H. (2022). Islamophobia: Differences across Western and Eastern community residents toward welcoming Muslim tourists. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 51(March), 439–450. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2022.04.018>
- Albatroy Jalius, A., & Kamaruddin, D. (2018). Power Interplay In The Implementation Of Legislative Functions (case study: conflict on Padang Panjang parliament within the determination of KUA PPAS fiscal year 2017). *2nd International Conference on Social and Political Development (ICOSOP 2017)*, 136(Icosop 2017), 156–162. <https://doi.org/10.2991/icosop-17.2018.24>
- Al-Jazeera. In .26 (محاولة التطبيق الشريعة في هولندا). October (2019), GW Wilders, Geert
- Amzat, J., & Razum, O. (2014). Sociology and Health. In *Medical Sociology in Africa* (pp. 1–19). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-03986-2_1
- Anshori, A. A. (2023). PCINU Belanda Terus Sebarikan Nilai-Nilai Islam Moderat di Eropa. Retrieved from <https://www.nu.or.id/internasional/pcinu-belanda-terus-sebarikan-nilai-nilai-islam-moderat-di-eropa-sFaPx>
- Arditama, E. (2016). Mengkaji Ruang Publik dari Perspektif Kuasa: Fenomena Kemenangan Aktor Hegemonik Melalui Dominasi Budaya. *Politik Indonesia: Indonesian*

- Political Science Review*, 1(1), 69–86.
<https://doi.org/10.15294/jpi.v1i1.9181>
- Böhmelt, T. (2010). The effectiveness of tracks of diplomacy strategies in third-party interventions. *Journal of Peace Research*, 47(2), 167–178.
<https://doi.org/10.1177/0022343309356488>
- Branco, C. (2011). Non-Governmental Organisations in the Mediation of Violent Intra-State Conflict: The Confrontation Between Theory and Practice in the Mozambican Peace Process. *E-Journal of International Relations*, 2(2), 77–95.
- Brill. Welten, L., & Abbas, T. (2022). Islamophobia and securitization: The Dutch case. Palgrave Macmillan.
- Zucca, L. (2012). *Secular Europe: Law and Religion in the European Constitutional Landscape*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199592784.001.0001>
- Cheng, J. E. (2015). Islamophobia, Muslimophobia or racism? Parliamentary discourses on Islam and Muslims in debates on the minaret ban in Switzerland. *Discourse & Society*, 26(5), 562–586.
<https://doi.org/10.1177/0957926515581157>
- Coser, L. A. (1966). Some Social Functions of Violence. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 364, 8–18.
<https://doi.org/http://www.jstor.org/stable/1034749>
- Diaz-Bone, R., Bührmann, A. D., Rodríguez, E. G., Schneider, W., Kendall, G., & Tirado, F. (2008). The Field of Foucaultian Discourse Analysis: Structures, Developments and Perspectives. *Historical Social Research*, 33(1), 7–28.
- Dufoix, S. (2009). *Deconstructing And Reconstructing “Diaspora”:* A Study In Socio-Historical Semantics. In

- Transnationalism (pp. 47–74). Leiden: BRILL.
<https://doi.org/10.1163/ej.9789004174702.i-788.15>
- Elazar, D. J. (1991). Land, State and Diaspora In The History of The Jewish Polity. *Jewish Political Studies Review*, 3(1/2), 3–31. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/25834195>
- Escolà-Gascón, Á., Díez-Bosch, M., & Micó-Sanz, J. L. (2022). Cross-cultural analysis of a new indicator which measures the degree of Islamophobia social awareness. *International Journal of Intercultural Relations*, 91(August), 158–169.
<https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2022.10.001>
- European Institute for Gender Equality. (2020). Gender equality index 2020: The Netherlands. Office of Publications.
<https://data.europa.eu/doi/10.2839/443669>
- Friedberg, A. L. (2005). The Future of U.S.-China Relations: Is Conflict Inevitable? *International Security*, 30(2), 7–45.
<https://doi.org/http://www.jstor.org/stable/4137594>
- Galperin, B. L., Lituchy, T. R., Acquaah, M., Bewaji, T., & Ford, D. (2014). Leadership and motivation in the African Diaspora: The United States and Canada. *Canadian Journal of Administrative Sciences*, 31(4), 257–269. <https://doi.org/10.1002/cjas.1296>
- Gheasi, M., & Nijkamp, P. (2017). A Brief Overview of International Migration Motives and Impacts, with Specific Reference to FDI. *Economies*, 5(3), 1–11.
<https://doi.org/10.3390/economies5030031>
- Göle, N. (2011). Islam in Europe: The lure of fundamentalism and the allure of cosmopolitanism. Publisher Mark Wiener.

- Gora, R. B. (2019). Melacak Peran Agama dalam Ruang Publik. *Logos*, 16(1), 61–73.
<https://doi.org/10.54367/logos.v16i1.562>
- Guizzo, D., & de Lima, I. V. (2015). Foucault's contributions for understanding power relations in British classical political economy. *Economia*, 16(2), 194–205.
<https://doi.org/10.1016/j.econ.2015.06.002>
- Gusnelly, Mudzakkir, A., Aidulsyah, F., & Mulyasari, P. N. (2021). *Belanda, Diaspora Muslim Indonesia di Identitas, Peran, dan Konektivitas Keagamaan Global*. Yogyakarta: Pustaka Obor Indonesia
- Gusnelly. (2010). Migrasi, Kewarganegaraan, dan Partisipasi pendatang: Studi Kasus pendatang Turki di Belanda. *Jurnal Kajian Wilayah*, 1(1), 59–78.
- Halévi, I., & Gresh, A. (2017). *Ruhāb al-Islām wa-ruhāb al-yahūdīya: Aṣ-ṣūra fī 'l-mir'āt = Islamophobie et Judéophobie: l'effet miroir* (S. aṣ-Ṣārūt, Trans.; aṭ-Ṭab'a al-ūlā). al-Markaz al-ʿArabī li-l-Abḥāṭ wa-Dirāsāt as-Sīyāsāt.
- Harnowo, T. (2020). Penerapan Teori Diskursus Habermas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Mimbar Hukum*, 32(1), 55–72.
<https://doi.org/10.22146/jmh.45145>
- Haugaard, M. (2022). Foucault and Power: A Critique and Rethorization. *Critical Review*, 34(3–4), 341–371.
<https://doi.org/10.1080/08913811.2022.2133803>
- Hess, K., & Gutsche, R. E. (2018). Journalism and the “Social Sphere.” *Journalism Studies*, 19(4), 483–498.
<https://doi.org/10.1080/1461670X.2017.1389296>
- Hofmann, M. W. (1999). *Islam, alternatively* (2nd enlarged ed). Amana.
- Karim, K. H. (2018). *Migration, Diaspora and Communication. In Diaspora and Media in Europe*. United Kingdom: Palgrave Macmillan Cham.
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-65448-5>

- Kaye, D. D. (2007). *Rethinking Track Two Diplomacy. In Talking to the Enemy: Track Two Diplomacy in the Middle East and South Asia*. California: RAND Corporation. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/10.7249/mg592nsrd.8>
- Kenny, K. (2013). *What is diaspora?* (K. Kenny, Ed.). *Diaspora: A Very Short Introduction*. United Kingdom: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/actrade/9780199858583.03.0001>
- Khan, T. H., & MacEachen, E. (2021). Foucauldian Discourse Analysis: Moving Beyond a Social Constructionist Analytic. *International Journal of Qualitative Methods*, 20, 160940692110180. <https://doi.org/10.1177/16094069211018009>
- Landman, N. (1991). Muslims and Islamic institutions in the Netherlands. *Institute of Muslim Minority Affairs. Journal*, 12(2), 410–432. <https://doi.org/10.1080/02666959108716215>
- Leclercq-Vandelannoitte, A. (2011). Organizations as Discursive Constructions: A Foucauldian Approach. *Organization Studies*, 32(9), 1247–1271. <https://doi.org/10.1177/0170840611411395>
- Lilja, M. (2018). The politics of time and temporality in Foucault's theorisation of resistance: ruptures, time-lags and decelerations. *Journal of Political Power*, 11(3), 419–432. <https://doi.org/10.1080/2158379X.2018.1523319>
- Mackenbach, J.P. (1992). Socio-economic health differences in the Netherlands: A review of recent empirical findings. *Social Sciences & Medicine*, 34(3), 213–226. [https://doi.org/10.1016/0277-9536\(92\)90264-Q](https://doi.org/10.1016/0277-9536(92)90264-Q)
- Mardiana, D. (2021). Analisis Wacana Model Michel Foucault Dalam Cerpen “Cinta Laki-Laki Biasa” Karya Asma Nadia. *Lingua: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan*

- Pengajarannya*, XVII(1), 53–65. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/lingua/article/viewFile/26737/12710>
- McDonald, J. W. (2012). The Institute for Multi-Track Diplomacy. *Journal of Conflictology*, 3(2), 66–70. <https://doi.org/10.7238/joc.v3i2.1629>
- Michels, A. M. B. (2006). Citizen participation and democracy in the Netherlands. *Democratization*, 13(2), 323–339. <https://doi.org/10.1080/13510340500524067>
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mullet, D. R. (2018). A General Critical Discourse Analysis Framework for Educational Research. *Journal of Advanced Academics*, 29(2), 116–142. <https://doi.org/10.1177/1932202X18758260>
- Muttaqien, M. E. (2023). Konsep Komunikasi Jurgen Habermas dalam Ide Demokrasi Deliberatif dan Tindakan Komunikatif. *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 51–64. Retrieved from <http://repository.unpas.ac.id/62090/>
- Najib, K., & Hopkins, P. (2019). *Veiled Muslim women's strategies in response to Islamophobia in Paris*. *Political Geography*, 73(May), 103–111. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2019.05.005>
- Noiriel, G. (1994). Foucault and History: The Lessons of a Disillusion. *The Journal of Modern History*, 66(3), 547–568.
- Olssen, M. (2014). Discourse, Complexity, Normativity: Tracing the elaboration of Foucault's materialist concept of discourse. *Open Review of Educational Research*, 1(1), 28–55. <https://doi.org/10.1080/23265507.2014.964296>
- Pitsoe, V., & Letseka, M. (2013). Foucault's Discourse and Power: Implications for Instructionist Classroom

- Management. *Open Journal of Philosophy*, 03(01), 23–28. <https://doi.org/10.4236/ojpp.2013.31005>
- Pondy, L. R. (1967). Organizational Conflict: Concepts and Models. *Administrative Science Quarterly*, 12(2), 296. <https://doi.org/10.2307/2391553>
- Pradipta, C. A. (2016). Pengaruh Islamophobia Terhadap Peningkatan Kekerasan Muslim di Perancis. *Global & Policy*, 4(2), 1–18.
- Prasetyo, A. A. (2022). Disrupsi Perpustakaan Sebagai Ruang Publik: Membedah Pemikiran Jurgen Habermas dan Ruang Publik Digital. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(3), 213–218. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/46177>
- Raboin, B. (2014). The Emergence of Multi-Track Diplomacy In International Dispute Resolution: The Treaty Oof Portsmouth And The Community That Made Peace Possible. *Willamette Journal of International Law and Dispute Resolution*, 21(1), 85–104. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/26210499>
- Rambe, T., Suhendro, P., Syahrul, L., Saragih, N., & Khairani. (2019). *Sejarah Politik dan Kekuasaan*. Medan: Penerbit Yayasan Kita Menulis. Retrieved from <http://digilib.unimed.ac.id/40835/3/Text.pdf>
- Rana, J. (2007). The story of Islamophobia. *Soul*, 9(2), 148–161. <https://doi.org/10.1080/10999940701382607>
- Rehman, I., & Hanley, T. (2023). Muslim minorities' experiences of Islamophobia in the West: A systematic review. *Culture and Psychology*, 29(1), 139–156. <https://doi.org/10.1177/1354067X221103996>
- Ridwan. (2022). *Kontestasi Mazhab Hisap dan Rukyat di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2018). *Sociological Theory* (10th ed.). California: SAGE Publications, Inc.

- Saharuddin. (2007). *Antropologi Ekologi*. Bogor: Fakultas Ekologi IPB.
- Saharuddin. (2007). *Antropologi Ekologi*. Bogor: Fakultas Ekologi IPB.
- Schippers, M. C., & Ziegler, N. (2019). Life Crafting as a Way to Find Purpose and Meaning in Life. *Frontiers in Psychology*, 10. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02778>
- Shadid, W. A. (1991). Integration of the Muslim Minority in the Netherlands. *International Migration Review*, 25(2), 355–374. <https://doi.org/10.1177/019791839102500205>
- Siddik, S. (2021). Diaspora Muslim Indonesia di Belanda Dorong Narasi Positif Islam. Retrieved from <https://www.ketiknews.id/internasional/pr-3012057559/diaspora-muslim-indonesia-di-belanda-dorong-narasi-positif-islam>
- Sunier, T. (2021). Islam, locality and belief: Creating a Muslim space in the Netherlands. *Ethnic and Racial Studies*, 44(10), 1734–1754. <https://doi.org/10.1080/01419870.2020.1851738>
- Supriadi, Y. (2017). Relasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermas. *Kajian Jurnalisme*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.24198/kj.v1i1.12228>
- Szczecińska-Musiela, E. (2016). Social Conflict Theory in Studying the Conflict in Northern Ireland. *Polish Sociological Review*, 193, 119–136. <https://doi.org/http://www.jstor.org/stable/44113929>
- Szumigalska, A. (2015). Annotated legal documents on Islam in Europe. The Netherlands.
- Taufiq, M., Harisudin, M. N., & Maimun. (2022). Multi-Track Diplomacy Fiqh of Nahdlatul Ulama in Countering Islamophobia in the Netherlands.

- Abkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 22(2), 287–310.
<https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.27963>
- Titley, G., & Lentin, A. (2021). Islamophobia, race and the attack on antiracism: Gavan Titley and Alana Lentin in conversation. *French Cultural Studies*, 32(3), 296–310. <https://doi.org/10.1177/09571558211027062>
- Tricana, D. W. (2013). Media Massa dan Ruang Publik (Public Sphere), Sebuah Ruang Yang Hilang. *ARISTO*, 1(1), 8–13.
<https://doi.org/10.24269/ars.v1i1.1538>
- Turner, B. S. (2016). Max Weber and the Sociology of Religion. *Revue Internationale de Philosophie*, 70(276), 141–150.
- Umanailo, M. C. B. (2015). *BUKU AJAR: Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Kediri: FAM PUBLISHING.
- Xu, K., Gao, H., Su, J., Bao, H., Zhan, B., Jiang, C., & Chen, L. (2022). Accommodation and Avoidance: Functional Conflict Theory (FCT)-Based Governance Logic of Resettled Community Conflict in China. *Land*, 11(10), 1867.
<https://doi.org/10.3390/land11101867>
- Yayusman, M. S., & Lissandhi, A. N. (2022). Hometown Transnationalism and the Emergence of Indonesian Diaspora Organizations in Europe. *Intermestic: Journal of International Studies*, 6(2), 422–441.
<https://doi.org/10.24198/intermestic.v6n2.9>
- Yendell, A., & Huber, S. (2020). Negative views of Islam in Switzerland with special regard to religiosity as an explanatory factor. *Zeitschrift Für Religion, Gesellschaft Und Politik*, 4(1), 81–103.
<https://doi.org/10.1007/s41682-020-00053-x>